

Buletin BPIW • Sinergi

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

KEMENTERIAN PUPR
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



Kaleidoskop 2016

Tahun 2016, BPIW Prioritaskan Penyusunan
Masterplan dan Development Plan

Terapkan SMM, BPIW Tingkatkan Kinerja Pelayanan



Edisi 12/Desember 2016



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbpiw@gmail.com

Telp. +6221-7279 8112

 www.bpiw.pu.go.id

 [@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)

 [Layanan Informasi BPIW](#)

Pelindung:

Rido Matari Ichwan

Penasehat:

Dadang Rukmana

Pengarah:

Bobby Prabowo
Harris H. Batubara
Hadi Suahyono
Agusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi:

P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:

Shoviah

Redaksi:

M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadhi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :

Hendra Djamal

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Andina Dwiky
Ichlasul Naufal
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: @InformasiBPIW
Youtube: Layanan informasi BPIW
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito

SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR edisi bulan Desember ini, dibahas mengenai program yang telah dilakukan BPIW sepanjang 2016, dan program yang akan dilakukan di 2017. Tema itu diangkat dalam rubrik Kabar Utama.

Pada rubrik Wawancara, menghadirkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian PUPR, Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT. Dalam rubrik ini dibicarakan mengenai program perkotaan selama 2016, dan rencana kegiatan 2017. Untuk laporan khusus dibahas mengenai Standarisasi Manajemen Mutu atau SMM, sertifikasi ISO 9001: 2008 dan ISO 9001 : 2015, yang dicapai beberapa unit kerja yang ada di BPIW.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW melalui rubrik Kilas BPIW. Di edisi penutup tahun 2016 ini, beberapa rubrik ditiadakan seperti Opini, Jalan-Jalan, Glossary, dan Review. Sebagai gantinya ditampilkan rubrik Kaleidoskop kegiatan BPIW sepanjang tahun 2016.

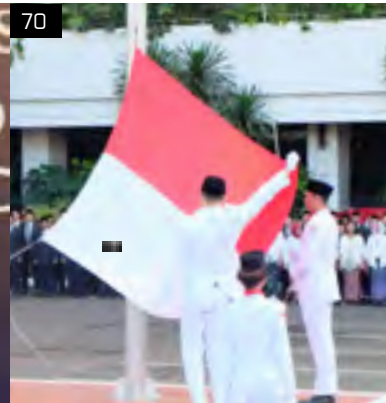
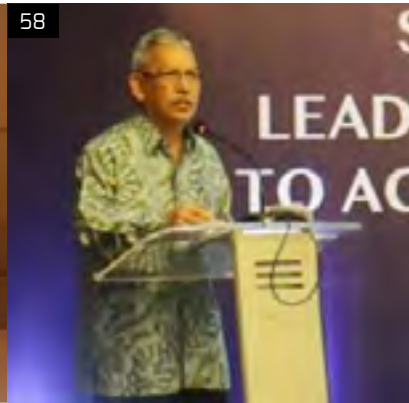
Semoga apa yang kami sajikan selama tahun 2016 bermanfaat bagi pembaca dan semoga sepanjang 2017 kita dapat meraih prestasi yang lebih baik.

Selamat membaca.



daftar isi

Edisi 12 - Desember 2016



01 SALAM REDAKSI

02 DAFTAR ISI

03 PERSPEKTIF

BPIW Konsisten Mengemban Tanggung Jawab Sebagai Perencana Infrastruktur PUPR

04 KABAR UTAMA

Tahun 2016, BPIW Prioritaskan Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan*

10 KALEIDOSKOP 2016

BPIW Terima Kunjungan Pemerintah Provinsi Jambi

54 WAWANCARA

Bersinergi Mengembangkan Kawasan Perkotaan

58 KILAS BPIW

Kementerian PUPR Dukung Peningkatan Infrastruktur dan Kesiapan SDM di Kawasan Timur Indonesia

66 LAPORAN KHUSUS

Terapkan SMM, BPIW Tingkatkan Kinerja Pelayanan

70 POTRET

Peringatan Hari Bakti PUPR

BPIW Konsisten Mengembang Tanggung Jawab Sebagai Perencana Infrastruktur PUPR

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2016 telah melakukan banyak kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan tersebut seperti pembuatan masterplan (rencana induk) dan development plan (rencana pengembangan) wilayah pengembangan strategis (WPS).

Kegiatan yang dilakukan BPIW didasari pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. Dari regulasi tersebut, BPIW memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Adapun fungsi BPIW meliputi, pertama penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kedua, penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ketiga, pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Keempat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kelima, pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan fungsi yang keenam adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Mengacu pada tugas dan fungsi tersebut, banyak program yang dilakukan BPIW pada tahun 2016 ini. Salah satu diantaranya menyelesaikan masterplan dan development plan 34 WPS. Pembuatan masterplan dan development plan telah dilakukan sejak tahun 2015, dimana telah diselesaikan 17 WPS, dan tahun 2016 ditargetkan dapat diselesaikan sebanyak 17 WPS.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban BPIW memang bukan hal ringan. Terlebih, BPIW dituntut untuk dapat menjadi yang terdepan dalam melakukan keterpaduan program pembangunan infrastruktur PUPR dan perencanaan yang dibuat BPIW menjadi

pedoman bagi Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Namun BPIW selalu konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sebagai perencana pembangunan infrastruktur PUPR.

Berkat kinerja dan komitmen yang dilakukan BPIW selama tahun 2016, sejumlah unit kerja di lingkungan BPIW juga meraih sertifikasi berstandar internasional (ISO) 9001: 2008 dan ISO 9001: 2015 dari lembaga sertifikasi.

Saat ini sertifikasi ISO 9001: 2008 dan ISO 9001: 2015 telah diraih Sekretariat BPIW lingkup Administrasi Kepegawaian serta Pengelolaan Program dan Evaluasi. Sertifikasi juga diraih Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW lingkup Penyusunan Rencana Strategis dan Analisis Manfaat Perencanaan Infrastruktur. Kemudian, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW lingkup Penyusunan program.

Selain itu, sertifikasi diraih juga Pusat Pengembangan Kawasan Strategis lingkup Pengembangan Kawasan Strategis dalam Pengadaan Tanah serta Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan lingkup Pengembangan Kawasan Metropolitan Kota Baru, Kota Besar dan Perdesaan.

Penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001: 2015 diharapkan dapat semakin memacu para pegawai di lingkungan BPIW agar bekerja menjadi lebih bersih, profesional, dinamis, produktif serta akuntabel. Hal tersebut dilakukan BPIW karena sebagai lembaga publik seluruh anggaran yang digunakan BPIW berasal dari rakyat, sehingga setiap rupiah yang digunakan perlu pertanggungjawaban output maupun outcome-nya. (**)



Tahun 2016, BPIW Prioritaskan Penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan*

35 WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS

35
Wilayah

Pengembangan Strategis (WPS)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Perak) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah menyiapkan 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur.

- Pulau-pulau kecil terluar
- WPS pusat pertumbuhan terpadu
- WPS pusat pertumbuhan sedang berkembang
- WPS pertumbuhan baru
- WPS pelebatan darat negara



Hingga akhir tahun 2016, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan banyak kegiatan, yang didasari pada tugas dan fungsinya, mulai dari pembuatan masterplan atau rencana induk dan development plan atau rencana pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) hingga dukungan terhadap 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Perencanaan yang dibuat BPIW diharapkan dapat menjadi *guidance* atau pedoman bagi unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan setiap kegiatannya, BPIW Kementerian PUPR berpatokan pada tugas dan fungsinya yang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. Dalam aturan itu disebutkan bahwa tugas BPIW adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Sedangkan fungsi BPIW adalah, pertama, penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kedua, penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Ketiga, pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Keempat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kelima, pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan fungsi yang keenam adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Didasari pada tugas dan fungsi tersebut, banyak program yang dilakukan BPIW pada tahun 2016. Salah satu diantaranya adalah menyelesaikan *masterplan* dan *development plan* 34 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Pembuatan *masterplan* dan *development* dilakukan sejak tahun 2015, dimana telah diselesaikan 17 WPS, dan kini juga akan diselesaikan sebanyak 17 WPS.

Beberapa WPS yang telah dibuatkan *masterplan* dan *development plan*, seperti WPS 2, yakni Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru. WPS 2 ini merupakan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu yang terletak pada 2 provinsi yakni Sumatera Utara dan Riau. Dalam *masterplan* WPS itu tercantum banyak program infrastruktur yang akan dilakukan hingga 2025. Beberapa diantaranya adalah Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi, Jalan Bebas Hambatan Tebing Tinggi – Sibolga, Waduk Lausimeme, dan Rusunawa

Mebidangro. Sedangkan *development plan* WPS 2 (2015-2019), seperti Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Siak (2017), Peningkatan Alur Tano Ponggol (2017), dan Pembangunan *Intake* dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku KI Tanju. Sedangkan WPS 35, yakni Pulau-Pulau Terluar, kedepan juga akan dibuatkan rencana induk dan rencana pengembangannya. Penyusunan *masterplan* dan *development plan* pulau-pulau terluar ini terkendala keterbatasan anggaran, mengingat jumlah pulau-pulau terluar cukup banyak, yakni sekitar 112 pulau. Nantinya, BPIW akan bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya pemerintah daerah (pemda) untuk mengetahui pulau-pulau mana saja yang berpenghuni.

Didasari pada tugas dan fungsi tersebut, banyak program yang dilakukan BPIW pada tahun 2016 ini. Salah satu diantaranya adalah menyelesaikan *masterplan* atau rencana induk dan *development plan* atau rencana pembangunan 34 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Sejak tahun 2015,

“Kita akan lakukan survei terhadap pulau-pulau yang berpenghuni, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dari survei ke lapangan itu, dapat diketahui pembangunan infrastruktur yang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat yang ada di sana,” ucap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, saat ditemui di ruang kerjanya, (21/12) lalu.

Didampingi Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Suchayono, Rido mengatakan Kementerian PUPR juga mendukung pengembangan kawasan perbatasan. Saat ini menurut Rido, Kementerian PUPR menangani pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ketujuh PLBN tersebut berbatasan darat dengan negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Untuk yang berbatasan dengan Malaysia adalah Entikong (Kalimantan Barat), Aruk (Kalimantan Tengah), Nanga Badau (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara). Selanjutnya, yang berbatasan dengan Timor Leste yakni Motaain, Motamasin, dan Wini. Ketiga daerah tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara

Timur (NTT). Sedangkan yang berbatasan dengan Papua Nugini yakni Skouw di Papua.

“PLBN ini sudah mulai dibangun sejak tahun 2015 lalu. Kita bangun PLBN dengan kualitas internasional dan tahun depan ditargetkan selesai semua. Dari 7 PLBN, maka yang sudah diresmikan Presiden pada 22 Desember, berada di Entikong,” tambah Hadi. Tidak hanya membangun PLBN, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur daerah perbatasan tersebut, seperti penataan permukiman warga dan penyediaan air minum.

Tentunya, pembangunan kawasan perbatasan ini juga berbasis pengembangan wilayah. Sebagaimana diketahui, bahwa pembangunan infrastruktur PUPR dibangun, didasari pada WPS. Hal ini untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah. Esensinya adalah memadukan antara pengembangan wilayah dengan “*market driven*”, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan fokus pada pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis.

Kemudian, pembangunan infrastruktur berbasis WPS ini untuk mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS dan mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS. Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. Selain itu diperlukan sinkronisasi program antar infrastruktur, baik dari segi fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana.

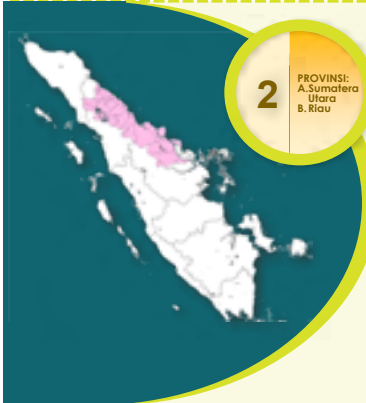
Masterplan dan *development plan* di WPS ini menurut Rido bertujuan untuk membuat program pembangunan infrastruktur di tahun 2018. “Sekarang program yang sudah dihasilkan segera kita diskusikan dengan unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah. Nantinya juga akan dibicarakan melalui Pra Konsultasi Regional, yang kemungkinan akan dilakukan pada Februari 2017 mendatang,” ujar Rido.

BPIW juga turut andil dalam hal dukungan Kementerian PUPR terhadap program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya pada pengembangan 3 KSPN, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (NTB). Sehubungan dengan hal itu menurut

WPS 2 (Medan - Tebing tinggi - Dumai - Pekanbaru)

PROFIL WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS 2

MASTER PLAN



2

PROVINSI:
A. Sumatera Utara
B. Riau

Merupakan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu yang terletak pada 2 provinsi:

- A. Provinsi Sumatera Utara**
1. Deli Serdang
 2. Kota Medan
 3. Simalungun
 4. Asahan
 5. Samsir
 6. Toba Samsir
 7. Serdang Bedagai
 8. Batubara
 9. Labuhan Batu Utara
 10. Labuhan Batu Selatan
 11. Labuhan Batu
 12. Kota Pematang Siantar
 13. Kota Tanjung Balai
 14. Kota Tebing Tinggi
- B. Provinsi Riau**
1. Kota Pekanbaru
 2. Kota Dumai
 3. Siak
 4. Pelalawan
 5. Kampar
 6. Bengkalis
 7. Rokan Hilir

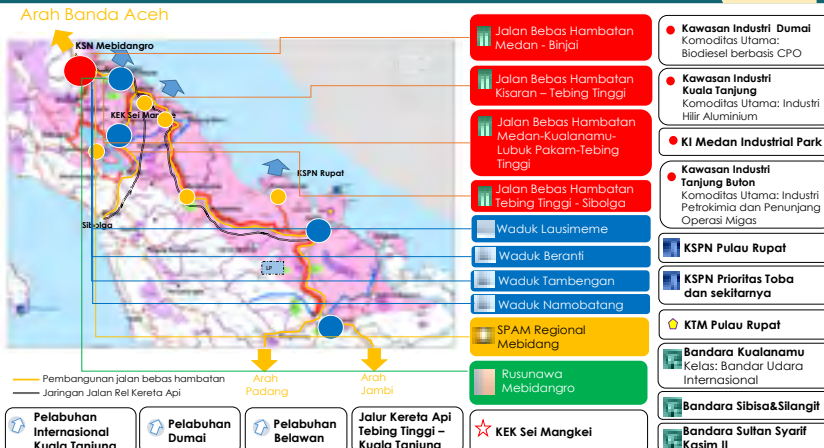
Memiliki jalan nasional dari Batas Provinsi Aceh hingga Kota Pekanbaru sepanjang **878,58 km** sebagai backbone utama



Kota Medan Jml Pddk : 2.191.140 Luas Wil. : 265 km2 PDRB : 67.236.758,77	Kab. Deli Serdang Jml Pddk : 1.984.598 Luas Wil. : 2.241,68 km2 PDRB : 34.939.520,24	Kab. Batubara Jml Pddk : 396.479 Luas Wil. : 922,20 km2 PDRB : 59.539.680,59
Kota Binjai Jml Pddk : 261.490 Luas Wil. : 59,19 km2 PDRB : 29.020.888,48	Kab. Simalungun Jml Pddk : 844.033 Luas Wil. : 4.369 km2 PDRB : 29.983.489,84	Kota Tanjung Balai Jml Pddk : 164.675 Luas Wil. : 107,83 km2 PDRB : 32.872.124,93
Kab. Karo Jml Pddk : 382.622 Luas Wil. : 2.127 km2 PDRB : 36.016.228,13	Kab. Serdang Bedagai Jml Pddk : 606.367 Luas Wil. : 1.900,22 km2 PDRB : 30.404.041,23	Kab. Asahan Jml Pddk : 699.720 Luas Wil. : 3.702,21 km2 PDRB : 34.667.595,98
Kab. Dairi Jml Pddk : 277.575 Luas Wil. : 1.927,80 km2 PDRB : 22.396.068	Kota Tebing Tinggi Jml Pddk : 154.804 Luas Wil. : 31 km2 PDRB : 46.421.104,17	Kab. Labuhanbatu Jml Pddk : 164.675 Luas Wil. : 2.156,02 km2 PDRB : 48.784.359,13
Kab. Samsir Jml Pddk : 123.065 Luas Wil. : 2.069,05 km2 PDRB : 22.930.551,05	Kab. Labuhanbatu Utara Jml Pddk : 347.465 Luas Wil. : 3.570,98 km2 PDRB : 46.421.104,17	Kota Dumai Jml Pddk : 280.109 Luas Wil. : 1.727,38 km2 PDRB : 23.767.071,85
Kota Pematang Siantar Jml Pddk : 178.568 Luas Wil. : 245,104 km2 PDRB : 239.266.755,09	Kab. Bengkalis Jml Pddk : 536.138 Luas Wil. : 7.773,93 km2 PDRB : 165.898.636,53	Kab. Siak Jml Pddk : 471.330 Luas Wil. : 8.556,09 km2 PDRB : 85.835.569,17
Kab. Rokan Hilir Jml Pddk : 627.233 Luas Wil. : 2.328,89 km2 PDRB : 29.015.758,99	Kab. Pekanbaru Jml Pddk : 1.011.467 Luas Wil. : 632,26 km2 PDRB : 74.235.018,20	Kab. Labuhan Selatan Jumlah Penduduk : 307.171 Luas Wilayah : 3.596 km2 PDRB : 57.119.470,88

MASTERPLAN WPS 2 MEDAN – TEBING TINGGI – DUMAI – PEKANBARU 2025

MASTER PLAN



STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

MASTER PLAN



DEVELOPMENT PLAN WPS 2 MEDAN – TEBING TINGGI – DUMAI – PEKANBARU (2015-2019)

1. Bendungan Lausime (2016-2019)
2. Pembangunan Jaringan rigid DJ Bajay (2017)
3. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Siak (2017)
4. Peningkatan Alur Tona Ponggol (2017)
5. Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku KI Tanjung Bulon (2018)
6. Studi Penetapan Batas Badan dan Sempadan Danau Toba (2018)
7. Pembangunan Bendung/Intake dan Jaringan pipa transmisi air baku di KEK Seimangkei (2018)
8. Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Perumahan Danau Toba Kab. Simalungun (2018)
9. Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Pulau Rupat (2018)
10. Pembangunan Bendung D1 Serdang (2018 - 2020)
11. Normalisasi Sungai Tanjung Kab. Bulohraja (2019)
12. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Belau Kab. Deli Serdang (2018-2020)
13. Pembangunan Bendung D1 Serdang 5.000 Ha Kab. Deli Serdang (2018-2020)
14. Pembangunan Penyediaan Air Baku untuk KEK Sei Mangkei (2019-2020)
15. Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Belawan (2019-2020)
16. Pembangunan Jaringan rigid D1 Serdang Kab. Deli Serdang (2018-2020)
17. Pembangunan Embung di Kab. Serdang Bedagai (2020)

1. Pembangunan Underpass Brigeldan Kalamso (2016-2018)
2. Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai (2016-2019)
3. Pembangunan Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi (2016-2019)
4. Pembangunan Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi (2016-2019)
5. Pembangunan Akses Bandara Sibisa (2017)
6. Pembangunan Lingkar Luar Parapat (2017)
7. Pembangunan Balige Bypass (2017)
8. Pembangunan Riyover Seimangkei (2018-2019)
9. Pembangunan Underpass Konektivitas (Anjutan) (2018)
10. Pembangunan Ring Road BUK Tenggora sampai BUK Barai Daya Kota Tebing Tinggi (2018)
11. Pembangunan Jalan Simp. Balang - Lubuk Galung Sekel II (2019)
12. Pelebaran Jalan Parapat Bts Kab Toba Samsir Akses Bandara Sibisa (2019)
13. Penggantian Jembatan Pengukuran Tele Kab Samsir (2020)
14. Pembangunan Fly Over Pinang Baris (2020)
15. Pembangunan Jalan sp. Kulum - Pelabuhan Dumai (2020)
16. Pembangunan Jalan Sijangkamall Prawang Subkren 11. Siak Sei Indrapura. Mangkapang (2020)
17. Pembangunan Jalan Sp. Kulum - Pelabuhan Dumai (2020)

1. Pengembangan TPA Regional Mebidang (2014)
2. Pembangunan IPLI Kota Medan (2017)
3. Penataan Kawasan Tomok Kab.Samsir (2017)
4. Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kumuh Serdang Bedagai (2017)
5. Pengembangan Kawasan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang (2015-2019)
6. Pembangunan IPAL terpusat Pekanbaru (2018)
7. Peningkatan Kapasitas IPA Tampian (2018)
8. Pembangunan IPA Kabupaten Rokan Hilir (2018)
9. Pembangunan PS3 Kawasan Kumuh Perkotaan Kws. Mandau (Duri Barati-Balang Serosa) (2019)
10. Penataan Kawasan Wisata Punguran-Tukuk-Tomok (SPAM, IPAL, PERSAMPAHAN) (2019)
11. Penataan Kawasan Pariwisata Prapat (2019)
12. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Dumai (Kab. Dumai), Telang dan Minas (Kab. Siak)(2019)
13. Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur IPAL Kota Binjai (2020)
14. Pembangunan TPA Kec. Dolok Masliu (2020)
15. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas IPAL KEK Sei Mangkei (2020)

1. Pembangunan Rumah Khusus di Kota Pekanbaru (2017)
2. Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus di Kota Medan (2017-2019)
3. Rumah Susun Sewa Khusus TNI, Kec. Siantar Markoba (2018)
4. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kota Pekanbaru (2018)
5. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk mendukung kegiatan kawasan industri (2018 - 2020)
6. Pembangunan PSU Rumah Khusus Kota Medan (2019)

Rido, ada dua hal yang dilakukan BPIW. Pertama, BPIW telah mempunyai program pengembangan tiga kawasan wisata tersebut, dimana dilakukan proses *screening* atau penyaringan oleh World Bank, agar layak masuk ke dalam program 2017.

"Kedua, saat ini sedang dipersiapkan studi dalam hal *integrated masterplan for tourism development*. Kementerian PUPR sendiri sudah punya integrasi. Kementerian Pariwisata dan Perhubungan juga terintegrasi ke situ. Nantinya ada *masterplan* baru untuk tiga kawasan itu. Untuk membuat *masterplan* akan dilelang dan ditargetkan bulan April nanti akan dilakukan penandatanganan lelang," ungkap Rido. Pengembangan tiga destinasi wisata ini dilakukan melalui *loan* dari World Bank.

Program lain yang digarap BPIW tahun ini adalah pengembangan kawasan perkotaan, seperti pengembangan kawasan metropolitan. Rido berharap kota-kota metropolitan juga disiapkan seperti

yang dilakukan pada kawasan pariwisata. Sehubungan dengan hal itu kata Rido, sedang disiapkan *integrated masterplan*, di mana kegiatan ini melibatkan beberapa instansi seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Kementerian ESDM

Kementerian PUPR menangani pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara. Ketujuh PLBN tersebut berbatasan darat dengan negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

dilibatkan karena terkait penyediaan listrik. Hal ini menjadi studi yang kita jalankan mulai tahun depan," ujar Rido.

Menyangkut program Kota Baru Publik Maja yang sudah dilakukan penandatanganan

nota kesepahaman beberapa waktu yang lalu, menurut Rido, ada beberapa hal yang tengah dilakukan. Pertama, membentuk forum komunikasi antar *stakeholder* yakni dengan empat kabupaten maupun kota, dua provinsi (Jawa Barat dan Banten), dua kementerian (PUPR dan Perhubungan), dan empat pengembang.

Kedua, didalam *masterplan* tersebut terdapat akses jalan dari Pamulang hingga ke Maja. Kajian lebih lanjut mengenai hal ini sedang dipersiapkan oleh Ditjen Bina Marga. "Hal-hal tersebut nantinya kita matangkan, seperti bagaimana tata ruangnya dan bagaimana pola pengembangannya. Maja ini juga jadi perhatian jangka panjang yang akan terus kita perhatikan," tegasnya.

Salah satu perhatian utama BPIW, adalah penyediaan perumahan yang berimbang di Maja dengan pola 1:2:3, dimana 3 untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 2 untuk masyarakat berpendapatan sedang, dan 1 untuk masyarakat atas.

Konsep Pengembangan Kota Baru Publik Maja



Luas: +18.276 ha

Populasi: 1,5 juta jiwa (2035)

SMART-GREEN AND INCLUSIVE CITY

Kota Baru Publik Maja:

ramah lingkungan, cerdas, produktif dan mensejahterakan warganya; kesempatan penerapan *TOD (Transit Oriented Development)* secara konsisten, percepatan perwujudan kota dengan inflasi rendah (harga properti terkendali)

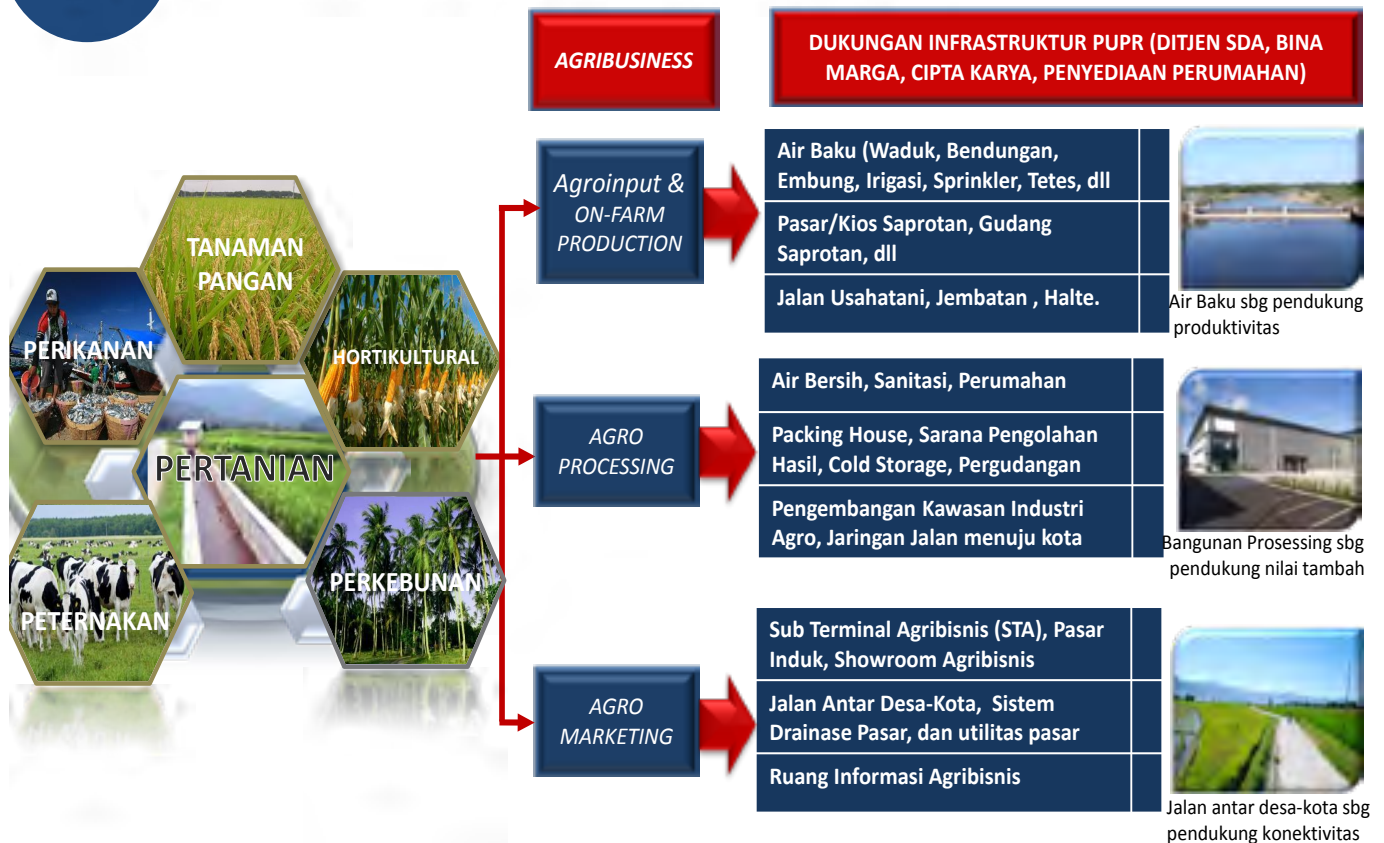


KONEKTIVITAS

- Commuter line* Jakarta – Parung Panjang bagian dari Jabodetabek
- Commuter line* Parung Panjang – Maja bagian dari Kota Baru Publik Maja
- Sistem jaringan transportasi wilayah & perkotaan khusus Kota Baru Publik Maja
- Pembangunan akses regional ke pelabuhan dan bandara
- Pembangunan dan inovasi pengembangan sumber daya air

Sumber: Shutterstock

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN



Dengan pola ini, maka 60% kawasan tersebut untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perumahan berimbang yang juga telah disepakati para pengembangan ini, harus dikawal terus oleh pemerintah pusat maupun pemda. Jadi masalah perumahan tersebut bagian dari tugas forum komunikasi," imbuh Rido. Dengan berkembangnya Maja sebagai Kota Baru Publik, makin banyak tenaga produktif yang bermukim di daerah itu. Untuk itu diperlukan hunian yang memadai.

Konsep pengembangan Maja dengan prinsip *smart - green and inclusive city*, yakni kota yang ramah lingkungan, kota cerdas, produktif dan mensejahterakan warganya. Konsep tersebut untuk menunjang Maja yang akan dijadikan Kota Satelit Mandiri. Selain itu, akses dari Maja ke daerah

sekitarnya juga dapat memudahkan para pekerja. Misanya perjalanan menggunakan kendaraan dari Maja ke Parung Panjang hanya membutuhkan waktu setengah jam saja. Sedangkan menuju Serpong hanya 45 menit dan Bintaro ditempuh kurang dari 1 jam.

BPIW juga telah melakukan penyusunan *masterplan* dan *Pra Detail Engineering Design (DED)* untuk mendukung 4 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yakni Morotai, Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan. Empat KPPN merupakan bagian dari 40 KPPN yang akan dikembangkan pemerintah dalam kurun waktu 2015-2019.

"Dengan demikian akses dari Maja menuju daerah sekitarnya, dapat diakses dengan mudah bagi pekerja. Tapi pekerjaanya tidak saja dari MBR. Paling banyak MBR di Parung Pajang. Kalau sudah di Serpong apalagi Bintaro mungkin pekerja yang MBR sedikit,

tapi pekerja non MBR lebih banyak. Jadi hal itu kita kawal, karena merupakan salah satu masalah yang paling penting," ucapnya.

Tidak hanya perkotaan, BPIW juga telah melakukan penyusunan *masterplan* dan *Pra Detail Engineering Design (DED)* untuk mendukung 4 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yakni Morotai, Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan. Empat KPPN merupakan bagian dari 40 KPPN yang akan dikembangkan pemerintah dalam kurun waktu 2015-2019. Untuk saat ini beberapa kementerian menyusun 14 KPPN. Dengan rinciannya sebagai berikut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi menyusun 8 *masterplan* KPPN, Kementerian PUPR melalui BPIW menyusun 4 *masterplan* dan Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN menyusun 2 *masterplan*. Menurut Rido, didalam *masterplan* juga terdapat pemberdayaan kelembagaan

tingkat lokal, seperti kelompok tani atau Poktan Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Dengan kolaborasi yang baik antar kelembagaan tersebut kata Rido dapat memasarkan produk pertanian yang sudah dihasilkan ke luar kawasan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut Rido mengatakan dalam pengembangan kawasan perdesaan, terdapat *mile stone* yang diterapkan Kementerian PUPR, dimana diawali penentuan tipologi desa di Indonesia dan pada akhirnya mengarah pada terjadinya pembangunan fisik. Diharapkan desa-desa yang ada, dapat menjadi desa mandiri. Selain itu menurut Rido juga diperlukan kolaborasi lintas instansi yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terkait Sistem Manajemen Mutu (SMM), tahun 2016, BPIW berhasil meraih sertifikasi *International Standardization Organization (ISO) 9001: 2008 dan ISO 9001 : 2015*. Saat ini sertifikasi ISO 9001: 2008 telah diraih Sekretariat BPIW lingkup Layanan Kesekretariatan Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan Program dan Evaluasi BPIW.

Sertifikasi tersebut juga diraih Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW lingkup layanan Penyediaan Kebijakan Teknis untuk Perencanaan Strategis dan Analisis Manfaat, Perencanaan Infrastruktur, Penganggaran dan Umum.

Selain itu Sertifikasi ISO 9001: 2008 diraih Pusat Pengembangan Kawasan Strategis lingkup layanan Penyediaan Kebijakan Teknis Area Inkubasi dan Fasilitasi Pengadaan Tanah. Sedangkan Sertifikasi ISO 9001:

2015 diraih Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW lingkup layanan Penyusunan Program pada Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR.

Kemudian, sertifikasi tersebut diraih Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan lingkup layanan Penyediaan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan, Kota Besar, Kota Baru serta Keterkaitan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.

Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan

Rido juga menegaskan bahwa BPIW sudah mengarah pada arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat BPIW Expo, 16 Desember lalu, dimana perencanaan pembangunan infrastruktur yang dibuat BPIW diminta menjadi *guidance* atau pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR lain, yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur.

pada tahun 2016, maka Rido menyimpulkan bahwa benang merah atau garis besarnya adalah bahwa program-program yang dilakukan BPIW diharapkan dilaksanakan ditjen-ditjen, terutama Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air (SDM), dan Penyediaan Perumahan berdasarkan pengembangan yang ada.

"Kegiatan yang dilakukan ada keberlanjutannya hingga satu kegiatan selesai dilaksanakan hingga tahun-tahun berikutnya. Namun yang jelas dengan adanya BPIW, pembangunan infrastruktur

dilakukan secara terpadu. Jadi kita sudah punya pola, dimana BPIW bisa mengawal keterpaduan pembangunan infrastruktur," kata Rido. Keterpaduan itu dilakukan baik dari segi penentuan lokasi pembangunan infrastruktur, pelaksanaan kegiatan, dan fungsi masing-masing pihak.

Rido juga menegaskan bahwa BPIW sudah mengarah pada arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat BPIW Expo, 16 Desember lalu, dimana perencanaan pembangunan infrastruktur yang dibuat BPIW harus

menjadi *guidance* atau pedoman bagi unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR lain, yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur. "Dalam 2 tahun berdirinya BPIW, kita sudah memberi arahan kepada unor-unor untuk menjalankan program yang sudah kita rencanakan, seperti perencanaan perkotaan dan rencana induk dan rencana pengembangan WPS," jelas Rido.

Setelah menyelesaikan seluruh program kerja di tahun anggaran 2016, BPIW telah memiliki program kerja untuk tahun 2017. Rido menyatakan

bahwa program BPIW tahun depan diarahkan untuk memperkuat, monitoring dan evaluasi terhadap program yang ada.

"Kalau dari monitoring dan evaluasi yang sebelumnya, perencanaan memiliki nilai yang bagus. Kemudian terkait pemrograman nilainya cukup tinggi yakni mencapai 90%. Hal itu perlu diperkuat. Sedangkan 34 WPS sudah berjalan," imbuhnya. Sementara itu juga akan dilakukan kajian mengenai dampak keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di setiap WPS. "Kajiannya seperti berapa dampak keterpaduan itu dari segi ekonomi dan sosial, itu bagian kajian 2017 mendatang," ulasnya.

Dari apa yang telah dilakukan Kementerian PUPR terutama BPIW, Rido berharap masyarakat melihat ada satu pergerakan ekonomi di setiap WPS, yang menjadi peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi di WPS tersebut. Disamping itu, pembangunan infrastruktur diluar WPS juga menjadi perhatian Kementerian PUPR. "Harapan kita dengan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR, masyarakat memiliki gairah untuk meningkatkan kegiatan usahanya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka," tukas Rido. **Tim Redaksi**



Kaleidoskop 2016



Januari



Februari



Maret



April



Mei



Juni



Juli



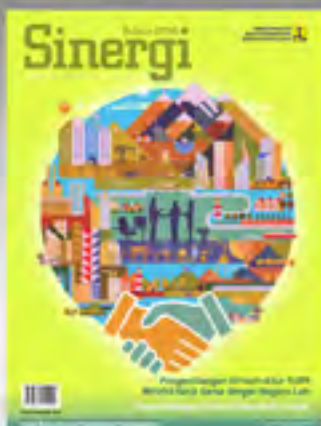
Agustus



September



Oktober



November



Desember

Sepanjang 2016, BPIW Kementerian PUPR telah melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana kegiatan yang telah dilakukan dimuat di buletin Sinergi yang setiap bulannya terbit (dengan tampilan cover yang tergambar di atas). Selain di buletin, kegiatan BPIW juga dimuat di website. Dari sejumlah berita, kali ini tim redaksi Buletin Sinergi merangkum kegiatan-kegiatan penting BPIW di sepanjang tahun 2016. Berikut ulasannya pada Kaleidoskop 2016 :

Januari 2016

BPIW Terima Kunjungan Pemerintah Provinsi Jambi



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Pemerintah Provinsi Jambi, di ruang pertemuan BPIW, Jakarta, Jumat (22/1). Dalam kunjungan ini, pihak BPIW dipimpin Kepala BPIW Hermanto Dardak, sedangkan Pemerintah Provinsi Jambi dipimpin Gubernur Terpilih Provinsi Jambi, Zumi Zola.

Zumi menjelaskan kunjungan ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membangun berbagai sarana infrastruktur. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan merupakan salah satu yang menjadi perhatian Zumi mengingat infrastruktur tersebut memiliki multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Apalagi dalam kurun waktu lima tahun kedepan, tantangan Pemerintah Provinsi Jambi masih berkuat dengan masalah infrastruktur jalan dan jembatan. "Membaiknya perekonomian masyarakat Jambi, sangat bergantung kepada kondisi infrastruktur jalan dan jembatan," ungkapnya.

Koordinasi Antar Kementerian dalam Mendukung Infrastruktur KSPN Danau Toba



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono turut menghadiri rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut pembentukan Badan otorita pariwisata Danau Toba yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya (Menko), Rizal Ramli di Institut Teknologi Del, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (9/1).

Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR, Basuki mengatakan bahwa saat ini PUPR sudah melakukan perencanaan dan pemrograman untuk mendukung infrastruktur untuk mengembangkan pariwisata di daerah Danau Toba yang dalam hal ini dilakukan oleh BPIW. Hermanto Dardak membenarkan bahwa akses memang menjadi masalah utama dalam pengembangan daerah wisata Danau Toba. "Kita tahu tantangan itu dan tidaklah mudah untuk mengatasinya. Namun, tantangan tersebut sudah mulai ditangani dengan pembuatan jalan tol Kualanamu – Tebing Tinggi yang direncanakan akan selesai di tahun 2016, dan Tebing Tinggi – Pemantang Siatar ditahun 2017" tutur Dardak.

Internalisasi Sistem Manajemen Mutu BPIW menuju ISO 9001:2015



Dalam rangka penyusunan Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memerlukan quality assurance sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar selaras dengan program sertifikasi berstandar internasional (ISO). Permen PU No.4/PRT/M/2009 tentang Manajemen Mutu Kementerian PU diterapkan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas di lingkungan BPIW.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPIW mengadakan sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001 yang merupakan kelanjutan pekerjaan tahun 2015. Acara dibuka oleh Dadang Rukmana, selaku Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR



Tahun 2016 sebagai tahun percepatan kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan "Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016". Acara penandatanganan kontrak dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado dan Jayapura melalui video conference di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta.

Paket kontrak tersebut antara lain:

- Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 Miliar untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain Pembangunan Jaringan DI Kelarik Kab. Natuna, Lanjutan Pembangunan Sistem Air Baku (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Anai I (6.764 Ha) Kab. Padang Pariaman (Lanjutan).
- Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 436 Paket senilai Rp. 7,93 Triliun, antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua.
- Bidang Infrastruktur Permukiman sebanyak 11 Paket senilai Rp. 68,87 Miliar, antara lain Pengembangan SPAM IKK Jatiningor (ITB) Tahap 2, SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau.
- Bidang Penyediaan Perumahan sebanyak 6 Paket senilai Rp. 4,8 Miliar, antara lain Penyusunan Manajemen Mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan SOP di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, Pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan.

Dalam sambutannya, Jokowi menuturkan bahwa ada tiga pesan yang disampaikan kepada Menteri PUPR, Ditjen-Ditjen terkait dan kontraktor yaitu dalam pembangunan infrastruktur agar membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan menyerap tenaga kerja lokal, gunakan kontraktor lokal agar terjadi peredaran uang di daerah dan utamakan untuk menggunakan local content.

"Tahun 2016 APBN untuk infrastruktur diutamakan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu siapkan manajer lapangan yang baik, sinkronisasi dengan antar kementerian dan pembangunan infrastruktur yang berbasis keseimbangan antar wilayah," jelas Jokowi.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa penyerapan anggaran di Bulan Januari ditargetkan sebesar

5-6 persen. Acara ini bukan seremonial semata, namun juga sebagai laporan Kementerian PUPR kepada masyarakat bahwa Kementerian PUPR siap bekerja dari awal Januari 2016. Biasanya penyerapan anggaran pada Bulan Mei-Juni hanya sebesar 6%, akan tetapi sekarang Kementerian PUPR akan tarik menjadi Bulan Januari sehingga penyerapan anggaran akan lebih baik.

Disamping menyaksikan penandatanganan kontrak, Presiden RI, Jokowi dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga melakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur untuk mengetahui perkembangan kedua proyek strategis tersebut. (ini)

Sumber: Website Resmi PUPR

Kementerian PUPR Gandeng World Bank dalam Program Sustainable Urbanization



Dalam mewujudkan visi Kementerian PUPR dalam membangun Indonesia, Kementerian PUPR menggandeng World Bank untuk dapat mendukung program-program prioritas yang direncanakan oleh Kementerian PUPR terutama yang berkaitan dengan *sustainable urbanization*. Dalam tindaklanjutnya, Kementerian PUPR mengadakan rapat pertemuan dengan World Bank yang membahas mengenai program-program Kementerian PUPR yang berkaitan dengan infrastruktur, permukiman dan penyediaan perumahan. Rapat tersebut dihadiri oleh Taufik Widjojono, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Andreas Suhono, Kepala Dirjen Cipta Karya, masing-masing Kepala Pusat di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan segenap rombongan World Bank.

Taufik Widjojono menjelaskan program Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019 akan berfokus pada ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas, pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat, pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas, serta meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi di bidang PUPR.

Pada pertemuan tersebut, Andreas Suhono juga menerangkan dari bidang Cipta Karya memiliki target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak dalam menyediakan infrastruktur dasar di permukiman. Untuk memenuhi target ini diperlukan bantuan oleh Pemerintah Daerah, pihak swasta dan investor, salah satunya World Bank karena keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Kementerian PUPR dan World Bank Sinergikan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata di Tahun 2016



Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menindaklanjuti koordinasi dengan World Bank dalam mengembangkan kawasan pariwisata di Indonesia. Menurut Alexandra Drees, selaku perwakilan dari World Bank yang hadir pada rapat tersebut saat ini terdapat dua kekurangan utama dalam pariwisata di Indonesia yaitu pelestarian lingkungan dan infrastruktur dari kawasan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Hermanto Dardak selaku Kepala BPIW Kementerian PUPR mengadakan rapat lanjutan dengan World Bank untuk koordinasi pengembangan kawasan pariwisata melalui konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW, serta pejabat BPIW lainnya.

Februari 2016

PUPR Siapkan 6 Wilayah Pengembangan Strategis di Pulau Sumatera



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur di Pulau Sumatera berbasis 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Untuk Pulau Sumatera, konsep WPS yang digagas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) ini untuk enam wilayah pertumbuhan sehingga wilayah strategis tersebut dapat disinergikan dan dirancang agar sesuai kapasitas yang ada.

Keenam WPS di Sumatera tersebut yakni Sabang-Banda Aceh-Langsa, Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, Batam-Tanjung Pinang, Sibolga-Padang-Bengkulu, Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan dan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT).

Kepala BPIW, Hermanto Dardak saat memberikan arahan pada pertemuan Pra Konsultasi Regional, di Medan, Jumat (5/2), menjelaskan bahwa keenam WPS tersebut merupakan penekanan dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera.

Pra Konreg di Kota Yogyakarta Digelar dengan Semangat Keterpaduan Infrastuktur Berbasis Wilayah Pengembangan Strategis



Setelah sukses melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) di Kota Medan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar Pra Konreg di Kota Yogyakarta, 11-12 Februari 2016. Saat membuka acara tersebut Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M. Eng. Sc., menyatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterpaduan infrastuktur PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Danis yang berbicara mewakili Sekjen Kementerian PUPR Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc ini menyatakan hal itu sejalan dengan visi Kementerian PUPR yakni "Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Dikatakannya juga bahwa pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR harus mengacu pada Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah Nasional untuk mempercepat pemerataan

pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi enam aspek, yaitu, percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan, peningkatan keterkaitan perkotaan dan pedesaan, pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan pengembangan tata ruang wilayah nasional.

Buka Pra Konsultasi Regional di Makassar, Sekjen Kementerian PUPR Minta Program Kerja 2017 dapat Membuka Lapangan Pekerjaan



Program kerja 2017, harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni memacu pengembangan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan wilayah. Hal ini disampaikan Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono saat membuka secara langsung Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg di Kota Makassar, Kamis (25/2). Dalam pembukaan Pra Konreg yang ke-4 ini, Taufik mengatakan bahwa meski tidak mudah untuk direalisasikan, namun Taufik menekankan agar hal itu harus diterjemahkan dalam bentuk program yang konkrit, sehingga arahan dari RKP tersebut bisa terlaksana.

"Tahun 2016 ini tahun pertama PUPR mengaplikasikan secara operasional dalam penyusunan program anggaran yang melibatkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. Sebelumnya ditangani Sekretariat Jenderal dalam hal ini biro perencanaan bersama teman-teman satminkal. Ini bagian dari proses atau upaya untuk memastikan bahwa program PUPR bisa mencerminkan kebutuhan wilayah," tegas Taufik.

Guna Menyinkronkan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, Pra Konreg Bali Digelar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali



mengadakan Pra Konreg di Denpasar, Bali, 18-19 Februari 2016. Kegiatan ini merupakan yang Pra Konreg ketiga kalinya, setelah sebelumnya dilaksanakan di Medan dan Yogyakarta. Saat mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono membuka kegiatan tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan kegiatan Pra Konreg ini bertujuan menerpadukan dan menyinkronkan pembangunan infrastruktur PUPR di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Diharapkan nantinya, pembangunan infrastruktur dapat lebih terakselerasi dengan baik terutama di daerah perbatasan dan kawasan pariwisata. "Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menekankan percepatan pembangunan di daerah perbatasan dengan Negara Papua Nugini maupun Timor Leste. Jalan raya perbatasan harus tersambung. Kemudian waduk- waduk, instalasi air bersih maupun permukiman juga harus menjadi prioritas utama kita," ungkapnya.

Bappeda Kabupaten Trenggalek Kunjungi BPIW Terkait Tindak Lanjut Usulan Pembangunan Infrastruktur



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Nung Isnaini beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Senin (1/2). Nung menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk menanyakan secara langsung tindak lanjut dari usulan pembangunan beberapa infrastruktur di

Kabupaten Trenggalek.

Usulan ini telah disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek melalui surat resmi ke BPIW beberapa waktu yang lalu. Saat melakukan pertemuan dengan Kepala BPIW Hermanto Dardak tersebut, Nung mengatakan beberapa pembangunan yang diusulkan untuk dibangun di Trenggalek yakni Bendungan Bagong, perbaikan irigasi dan geometrik jalan di sekitar Lingkar Wilis, pembangunan Jembatan Gantung di Margomulyo, penataan kawasan kumuh dan pembangunan rusunawa di daerah Watulimo.

Menanggapi hal itu, Dardak mengatakan bahwa pada bulan ini akan diadakan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk menyusun program-program di tahun 2017. Momen ini menurutnya akan menjadi waktu yang tepat untuk Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Trenggalek untuk menyampaikan apa saja pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas. "Kabupaten Trenggalek dapat menghadiri Pra Konreg untuk daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa yang akan diadakan pada tanggal 11-12 Februari 2017 di Yogyakarta," ungkap Dardak.

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dengan Membangun Infrastruktur



Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Pelabuhan Bitung dapat menjadi pintu gerbang utama di wilayah timur Indonesia di masa depan. Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dengan pembangunan jalan tol Manado menuju Bitung sepanjang 39 kilometer sebagai infrastruktur penunjang.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak yang hadir mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam diskusi Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian.

Kementerian PUPR dan World Bank Koordinasikan Pengembangan Kawasan Tanjung Lesung dengan Bappeda Provinsi Banten



Kawasan Wisata Tanjung Lesung yang berada di Provinsi Banten, merupakan satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas yang akan dikembangkan pemerintah. Tanjung Lesung juga telah ditetapkan sebagai salah satu dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Guna membahas rencana pengembangan kawasan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan World Bank melakukan rapat koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, di ruang rapat Bappeda, Selasa (23/2).

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginagin mengatakan pengembangan pariwisata di wilayah selatan seperti Tanjung Lesung akan memberi multiplier effect terhadap perekonomian Provinsi Banten. Selain Tanjung Lesung, dampak pariwisata akan mempengaruhi kawasan wisata di sekitarnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Bayah, dan Kampung Suku Baduy.

Hermanto Dardak Paparkan Rencana Percepatan Pembangunan Di Depan Investor Pasar Modal



Kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak memaparkan rencana percepatan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah khususnya terkait infrastruktur di depan para investor pasar modal dalam acara Market Outlook 2016, di Jakarta, Selasa (23/2). Acara yang diselenggarakan tiap tahun oleh Panin Asset Management ini bertujuan untuk memberikan edukasi, ulasan dan prediksi keadaan pasar tahun berjalan, kepada para pelaku pasar modal.

Dalam acara ini Hermanto menjelaskan terkait tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia. Dikatakannya, saat ini Indonesia dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di saat yang sama pula infrastruktur dipacu untuk memiliki daya saing. Tantangan lain menurut Dardak adalah terkait disparitas antar wilayah, terutama antara Kawasan Barat Indoensia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). "Kita melihat Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi yang didepan dalam arti hanya dengan luas lahan 30%, namun ekonominya mencapai lebih dari 80% dan infrastrukturnya relatif lebih baik dibanding kawasan diluar Jawa dan Sumatera, yang luasnya sekitar 70% dari lahan nasional kita," ujar Dardak. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan di KTI tersebut.

BPIW Kembali Lakukan Koordinasi dengan World Bank Terkait Pengembangan Tiga Kawasan Wisata



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali melakukan koordinasi dengan World Bank terkait pengembangan tiga kawasan wisata, yakni Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Lombok. Rapat koordinasi yang dilakukan di ruang pertemuan BPIW, Selasa (16/2), dipimpin langsung Kepala BPIW Hermanto Dardak.

Dardak menjelaskan tiga kawasan wisata tersebut merupakan bagian dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan dijadikan sebagai "10 New Bali". Selain itu pengembangan kawasan wisata tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target jumlah wisatawan mancanegara sebesar 20 juta orang pada tahun 2019 mendatang.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri eselon II dan III BPIW serta tim dari World Bank tersebut, Dardak menjelaskan upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target itu adalah mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah, membangun kapasitas sumber daya pariwisata, pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), pembangunan infrastruktur dan pengembangan kelembagaan di kawasan pariwisata tersebut.

Maret 2016

Kementerian PUPR Siapkan Program Pendukung Percepatan 10 KSPN



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung percepatan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak, saat rapat pembahasan kelembagaan pembangunan destinasi pariwisata, di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (23/3). Lebih lanjut Dardak menjelaskan salah satu KSPN yang mendapat dukungan Kementerian PUPR yakni kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara. "Kami mempercepat pembangunan wisata di kawasan tersebut dengan membuat jalan tol, sehingga yang tadinya dari Danau Toba ke Medan memakan waktu 5 jam, maka dengan adanya percepatan pembangunan jalan tol, maka 1,5 jam sudah sampai ke sana. Pembangunan jalan tol sampai Tebing Tinggi, kita tambah hingga Parapat, sehingga dengan hanya menempuh perjalanan sekitar 130 kilometer, dalam waktu 1,5 jam sudah sampai ke Danau Toba," ungkap Dardak.

Tidak hanya mendukung menuju destinasi wisata, Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Danau Toba. Beberapa diantaranya membuat jalan lingkaran luar yang menghubungkan Parapat ke Balige hingga Sibolga. "Dengan pembangunan jalan ini, maka ada jalan akses menuju Samosir. Jalan lingkaran luar yang di Samosir kita jadikan jalan nasional. Kita prioritaskan akses menuju pusat-pusat wisata tadi dapat kompetitif," tegas Dardak.

BPIW Koordinasikan Pengembangan Kota Baru Maja

Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten akan dijadikan kota baru. Kota baru Maja ini merupakan satu dari 10 kota baru publik yang ditetapkan sebagai kota mandiri dan terpadu. Terkait hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)



melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bogor, dan perwakilan dari Bappeda Kabupaten Lebak, Tbk, serta satminkal terkait, di Gedung BPIW Kementerian PUPR, Kamis (10/3).

Dalam rapat ini juga dibahas mengenai rencana Memorandum of Understanding atau MoU antara Kementerian PUPR dan pemangku kepentingan terkait pengembangan 10 kota baru tersebut. Langkah yang dilakukan ini merupakan pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 mengenai pengembangan kota baru yang diharapkan dapat mendukung program sejuta rumah.

Saat memimpin rapat itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mengatakan bahwa nantinya proyek ini memadukan jalan eksisting dengan jalan yang sama sekali belum ada. Tujuannya untuk membuka akses menuju kota baru tersebut. Diharapkan nantinya ada perpaduan jalan nasional dengan jalur kereta api, agar terdapat alternatif transportasi bagi masyarakat.

Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba Melalui Koordinasi Lintas Kementerian



Saat ini, Pemerintah terus mengupayakan pengembangan pariwisata Danau Toba, salah satunya dengan menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menko Maritim, Rizal Ramli memimpin rapat koordinasi dengan beberapa kementerian, seperti, Menko Polhukam, Menteri Pariwisata, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, perwakilan Menteri Keuangan, perwakilan Sekretaris Negara, serta 7 Bupati dari Kabupaten di sekitar Danau Toba, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (10/3). Rapat ini juga menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Danau Toba beberapa waktu lalu.

Saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pertemuan

itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak memaparkan beberapa dukungan Kementerian PUPR dalam pengembangan kawasan pariwisata di Sumatera Utara tersebut.

Dardak menyatakan bahwa tahun ini bidang keciptakarya sedang melakukan pembersihan eceng gondok di sekitar Danau Toba. Selain itu bersama World Bank juga telah dilakukan survei langsung ke Mandalika, Tanjung Lesung dan Danau Toba. Ketiga kawasan tersebut merupakan bagian dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang diprioritaskan pemerintah untuk dikembangkan.

Menteri PUPR: Percepatan implementasi Kerjasama Pengembangan Eco District



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Corinne BREUZE, yang juga membawa delegasi dari French Ministry of Environment, Energy, and Maritime Affairs (MEDDE) dan French Environment and Energy Management Affairs (ADEME) di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (8/3). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh pejabat Eselon I Kementerian PUPR yakni Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) beserta jajaran, Kepala Badan Litbang, Dirjen Sumber Daya Air dan Direktur Jenderal Cipta Karya

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada inisiatif awal dalam bentuk penyusunan implementasi konsep Eco District pada tahun 2013. Eco District merupakan perencanaan perkotaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologis. Gagasan ini menekankan pada pertimbangan masalah lingkungan dengan mengakomodasi konsep Kota Hijau. Konsep tersebut sudah diterapkan di 7 kota di Indonesia, yaitu Kota Bandung, Mataram, Yogyakarta, Singkawang, Wonosobo, Semarang dan Metro Lampung

Tol Pejagan – Pemalang Akan Dibuka Sebelum Idul Fitri

Pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang yang sudah mencapai 95 persen, diharapkan pada Mei 2016 atau sebelum Idul Fitri sudah dapat dibuka untuk umum. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hermanto Dardak saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi keynote speech pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tegal, Rabu (30/3).



Menurutnya, dengan dibuka akses jalan tol ini akan memudahkan perjalanan para pemudik menjelang lebaran. Pembangunan Jalan tol sepanjang 20 kilometer yang merupakan Seksi II ini dilakukan mulai dari Pejagan hingga Brebes Timur. Sementara untuk seksi I (Pejagan-Brebes Barat) pembangunannya sudah 100 persen.

Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga Terkait Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Sektor PUPR



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali mengadakan rapat koordinasi atau rakor pemberdayaan kawasan perdesaan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) dengan beberapa perwakilan dari instansi terkait seperti Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan tersebut diadakan di ruang rapat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Selasa (15/3).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rakor sinkronisasi program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan tahun 2016 antar kementerian dan lembaga. Selain itu rakor tersebut dilakukan untuk mendapatkan lokasi yang akan direkomendasikan sebagai kawasan perdesaan prioritas nasional. Pengembangan kawasan yang memiliki potensi ekonomi tersebut merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Harmonisasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dibutuhkan dalam Pembangunan Daerah di Indonesia



Pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan berpedoman pada penataan ruang. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor. Sehingga diharapkan lebih mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan memberi dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antar sektor serta antar kota dan desa, atau antar lingkungan atau kawasan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak, saat menjadi narasumber dalam talkshow Indonesia Bicara yang mengangkat tema "Membangun Daerah Bagi Indonesia" di MNC Channel, Jakarta (28/4).

Dalam diskusi tersebut, Dardak menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah lebih aktif dalam mengembangkan wilayah melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dikatakannya, dalam WPS tersebut terdapat dukungan-dukungan berupa pembangunan infrastruktur ke beberapa kawasan seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang digagas oleh Kementerian Pariwisata, Kawasan Industri (KI) oleh Kementerian Perindustrian dan kawasan-kawasan lainnya. Kementerian PUPR melalui BPIW memberikan dukungan berupa penyusunan masterplan di wilayah tersebut.

Bahas Pengembangan Danau Toba, BPIW Lakukan Rapat Koordinasi dengan World Bank dan Instansi Lainnya di Medan

Kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara menjadi satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas yang akan dikembangkan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)



melakukan rapat koordinasi dengan World Bank, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian terkait lainnya, di Medan Rabu (2/3).

Dalam paparannya, Kabid Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Poppy M. Hutagalung menjelaskan bahwa kawasan Danau Toba merupakan terbesar di Indonesia, karena meliputi 8 kabupaten dan 64 kecamatan, dengan total luas kawasan (perairan dan daratan) mencapai 656.261 Ha. Selain berpotensi dalam bidang pariwisata, Danau Toba juga dapat dikembangkan menjadi lumbung pangan dan areal perkebunan. Namun diakui jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah permasalahan akses menuju kawasan wisata tersebut.

April 2016

JKPI Minta BPIW Membantu Penyusunan *Masterplan* Kota Tua



Indonesia memiliki banyak kota tua atau kota yang memiliki bangunan-bangunan tua yang merupakan heritage atau cagar budaya. Untuk menjaga dan melestarikan kota tua yang juga berfungsi sebagai tempat kunjungan wisata ini, maka penataannya perlu dibuat modern dan tanpa menghilangkan keaslian dan keunikan bangunan-bangunan yang ada tersebut. Untuk itu diperlukan masterplan untuk seluruh kota tua di Indonesia. Sebagai 'Bappenasnya' Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) diharapkan dapat membantu penyusunan masterplan kota-kota yang memiliki bangunan-bangunan tua.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Jaringan Kota Pusaka

Indonesia (JKPI) yang juga Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin, saat berkunjung ke BPIW, Rabu (20/4). Lebih lanjut Illiza menjelaskan anggota dari JKPI berjumlah 54 anggota, yang terdiri dari kota-kota yang memiliki kota tua. Dari jumlah tersebut sebagian belum memiliki masterplan.

Sementara itu Kepala BPIW Hermanto Dardak menyatakan instansinya siap memberi dukungan terkait penyusunan masterplan tersebut. Lebih lanjut Dardak mengutarakan bahwa Kementerian PUPR mendukung pengembangan kawasan heritage sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Beberapa satuan administrasi pangkalan atau satminkal dapat berperan seperti Ditjen Cipta Karya terkait penyediaan air dan Ditjen Penyediaan Perumahan dapat mengembangkan penyediaan perumahan di kawasan tersebut. "Kita harus merancang pengembangan kota tua dan kita kordinasikan dengan stakeholder, ini kita lakukan, karena pembangunan infrastruktur saat ini berbasis pengembangan wilayah," tutur Dardak.

Saat itu Dardak juga menjelaskan mengenai pelaksanaan Konsultasi Regional atau Konreg yang telah dilaksanakan Kementerian PUPR melalui BPIW, beberapa hari yang lalu. Sebelum pelaksanaan Konreg, dilakukan Pra Konreg di empat kota, yakni Medan, Yogyakarta, Bali, dan Makassar. Dalam kegiatan itu, PUPR mensinkronkan rencana pembangunan di tahun 2017 mendatang.

Kementerian PUPR Dukung Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tanah Bumbu melalui WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin



Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu Kabupaten yang akan didukung oleh Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastrukturnya. Hal tersebut mengacu pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), tepatnya WPS 22, yakni Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin. Adanya WPS tersebut menunjukkan bahwa Batulicin yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, agar rencana pengembangan itu dapat lebih optimal, Dardak berharap Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat mengembangkan daerahnya sebagai kawasan pertumbuhan yang memiliki prospek yang baik.

Demikian disampaikan Hermanto Dardak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, saat menerima kunjungan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Mardani. H. Maming, Senin (25/4). Dalam kunjungan tersebut, Mardani mengusulkan beberapa dukungan program pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

BPIW Lakukan Koordinasi Program Pengadaan Tanah dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Monitoring Tanah



Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rapat koordinasi tentang pembaharuan data pengadaan tanah dan penyusunan rencana aksi tahunan program pengadaan tanah PUPR, di Jakarta Selatan, Rabu (27/4). Selain melakukan rapat koordinasi, juga dilakukan sosialisasi sistem monitoring tanah atau Simonah. Kegiatan ini dihadiri beberapa satminkal seperti Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, dan BPIW.

Saat membuka acara tersebut, Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah BPIW, Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M. Appl. Sc mengatakan dalam upaya menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang efisien, efektif serta tepat waktu, diperlukan sistem informasi manajemen pengelolaan tanah berbasis website.

“Dengan adanya program Simonah ini, informasi tentang tanah tidak lagi tumpang tindih, dapat diakses serta dapat dilihat oleh seluruh Kementerian PUPR baik pusat maupun di daerah,” tutur Samsi. Sistem tersebut terintegrasi dengan e-monitoring Kementerian PUPR. Dengan demikian melalui aplikasi ini penyajian data secara konprehensif dan tertib, dapat terwujud.

BPIW Gelar Focus Group Discussion Manajemen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dipilih menjadi salah satu koordinator Penajaman Rencana Aksi dalam mendukung Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk mendukung hal tersebut, BPIW menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Manajemen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di Bogor, Kamis (28/4)

Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menjelaskan Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggara pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

“Dapat dikatakan bahwa BPIW sendiri dibentuk oleh sebuah proses reformasi birokrasi sehingga ketika melaksanakan tugas dan fungsinya, ini berarti BPIW sebenarnya sedang menjalankan proses reformasi birokrasi.” ujar Dadang.

Kunjungi BPIW, Komisi V DPR RI Bahas Pengembangan Kawasan Lingkar Wilis



Sebanyak tiga orang anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (5/4). Dalam kunjungan tersebut dilakukan pertemuan dengan Kepala BPIW, Hermanto Dardak beserta para pejabat eselon II dan III. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai rencana pengembangan kawasan Lingkar Wilis di Provinsi Jawa Timur. Keempat anggota Komisi V yang hadir adalah Ir. Sudjadi (Dapil VI Jawa Tengah), Budi Yuwono, DIPL, SE (Dapil VI Jawa Timur), dan Ir. Sigit Sosiantomo (Dapil I Jawa Timur). Pada kesempatan itu, Dardak menjelaskan bahwa dalam menyusun program pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah pertumbuhan. Dengan cara ini diharapkan terjadi konektivitas seluruh kawasan, seperti pada kawasan Lingkar Wilis. Kawasan tersebut menghubungkan enam Kabupaten di Jawa Timur yaitu Nganjuk, Kediri, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, dan Madiun.

“Disparitas antara Jawa bagian utara dan selatan masih cukup tinggi. Bagian selatan ini relatif tertinggal, sehingga diperlukan pembangunan. Wilayah tersebut dibangun bukan hanya infrastrukturnya, namun kawasannya juga diberi nilai tambah. Potensi sinergi dari enam Kabupaten itu untuk membangun suatu pusat pertumbuhan wisata maupun agro bisnis,” ujar Dardak.

BPIW Gelar Rapat Bahas Pengembangan Kotabaru Maja



Kecamatan Maja yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, direncanakan akan dikembangkan menjadi kotabaru publik. Untuk itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak, di Jakarta Selatan, Selasa (12/4).

Saat membuka rapat tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kuswardono menjelaskan dalam rapat ini dibahas dua hal yakni trase Jalan Pamulang-Setu-Parung Panjang-Maja, dan pembahasan draft kesepakatan bersama para pihak terkait.

Maja merupakan satu dari 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Pengembangan kota baru publik ini sekaligus mendukung program sejuta rumah. "Maja ini akan dilakukan untuk pembangunan jalan nasional, sebagai upaya kita mendorong pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Jadi output yang kita harapkan itu adalah pembangunan rumah MBR bersubsidi. Kebetulan ada juga inisiatif dari pihak swasta yang membangun rumah dan jalan," ungkapnya.

Kementerian PUPR Fokus Membangun Kawasan Perbatasan



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menfokuskan pada pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Kota Sarawak, Malaysia. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat berbicara mewakili Menteri PUPR, pada pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalimantan Barat, di Pontianak, Kamis (14/4).

Dardak menjelaskan beberapa pembangunan infrastruktur di provinsi ini seperti ASEAN Highway, penanganan kawasan perbatasan, dan program pembangunan infrastruktur yang mendukung rencana pembangunan tol laut tahun tahun 2017. Selain itu pembangunan bandar udara, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), Perkeretaapian, Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

"Kalimantan Barat merupakan salah satu ujung tombak perbatasan dengan negara lain. Kawasan perbatasan akan menjadi salah satu pusat fokus pembangunan, seperti pelebaran dan rekonstruksi jalan ruas perbatasan Entikong, serta renovasi gerbang pintu masuk perbatasan di daerah Entikong itu," tutur Dardak.

Kementerian PUPR Siapkan Program Strategis Pengembangan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan



Dalam rangka menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema Membangun Daya Saing Daerah Menuju Kalsel Mandiri, Terdepan dan Berkelanjutan di Banjarbaru, Senin (11/4). Kegiatan ini juga untuk memantapkan isu-isu strategis pembangunan daerah termasuk yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan nasional.

Saat mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada acara tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rezeki Peranginangin memaparkan mengenai rencana pembangunan infrastruktur tahun 2017, khususnya untuk provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut Rezeki menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dengan pendekatan WPS ini dioptimalkan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan pendekatan market driven, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan.

Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur di Perbatasan Papua dengan Papua New Guinea, Melalui Program Wilayah Pengembangan Strategis



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Penanganan infrastruktur yang merupakan amanah dari Nawacita ini, dilakukan dengan pendekatan program Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Penanganan wilayah perbatasan tersebut untuk mendukung pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat berbicara pada Forum Koordinasi Peningkatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Merauke, Rabu (27/4).

Lebih lanjut Dardak menjelaskan kawasan perbatasan di Papua tercakup dalam WPS 34 yakni Jayapura-Merauke. Dalam WPS ini memerlukan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke, sepanjang 1.105 km. "Pengembangan kawasan perbatasan akan mendukung pertahanan dan untuk keamanan dan sekaligus untuk pengembangan wilayah, dengan mempertimbangkan satu hal, bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Dardak. Penataan kawasan perbatasan antara lain dengan pembangunan Pos lintas batas negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan PLBN termasuk penyediaan infrastruktur dasar.

Provinsi Banten Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Tahun 2017

Pemerintah Provinsi Banten memprioritaskan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan potensi wilayah pada tahun 2017. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten. Pembangunan infrastruktur tersebut untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten, Kamis (7/4).



Rano mengatakan salah satu prioritas pembangunan di Banten adalah peningkatan konektivitas dan dukungan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian yang merata di setiap wilayah. "Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur adalah yang utama dilakukan di Banten," tegas Rano.

Saat berbicara mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menyatakan jalan tol akan menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Dijelaskannya, saat ini sedang dibangun proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Provinsi Banten seperti jalan tol Serang – Panimbang sepanjang 83,6 km, Kunciran – Serpong sepanjang 11,19 km, Serpong – Cinere sepanjang 10,14 km dan Serpong – Balaraja sepanjang 30 km. "Dari pintu tol Merak menuju pintu penyebaran saat ini sudah dilebarkan menjadi 4 lajur yang dimaksudkan untuk menjaga daya saing wilayah," ungkap Dardak.

Kementerian PUPR Siapkan Dukungan Infrastruktur Baik untuk Asian Games maupun Pengembangan Infrastruktur DKI Jakarta



Menjelang pelaksanaan Asian Games yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang tahun 2018 mendatang, pemerintah melakukan berbagai persiapan. Untuk pelaksanaan Asian Games di Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melakukan penataan dan renovasi 14 bangunan venue di Kawasan Komplek Gelora Bung Karno (GBK). Selain itu Kementerian PUPR juga

akan menyiapkan pembangunan rumah susun atau rusun untuk masyarakat yang berpendapatan rendah (MBR). Direncanakan rusun yang akan dibangun itu mencapai 18 hingga 32 tingkat. Kawasan rusun tersebut juga ditata dengan untuk menyambut perhelatan akbar tersebut.

Saat berbicara di depan Sidang Kelompok Bidang Prasarana Sarana Kota Dan Lingkungan Hidup Musrenbang DKI Jakarta, Jumat (15/4) lalu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak menjelaskan rumah susun ini akan menggunakan konsep superblok, dimana terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH), akses yang mudah untuk angkutan umum dengan penataan ulang jaringan jalan, dan trotoar yang dilebarkan untuk pejalan kaki.

BPIW Telah Menyusun Program Prioritas Berdasarkan Kewilayahan Untuk Tahun 2017



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun program prioritas berdasarkan kewilayahannya untuk tahun anggaran 2017. Program ini disusun setelah dilakukannya Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang dilaksanakan empat kota besar di Indonesia, yakni Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar. Dari hasil Pra Konreg tersebut diketahui bahwa kebutuhan anggaran infrastruktur PUPR tahun depan, mencapai Rp 166 triliun.

Demikian disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada pelaksanaan Konreg, yang diadakan di Gedung Pertemuan Kementerian PUPR, Selasa (19/4). Lebih lanjut Basuki menjelaskan total kebutuhan anggaran tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPIW Hermanto Dardak memaparkan mengenai Pra Konreg dan hasil penajaman program 2017. Menurut Dardak dari rekapitulasi program Kementerian PUPR di 2017, kebutuhan anggaran sebesar Rp 166 triliun tersebut dibagi berdasarkan program untuk mendukung empat agenda Nawacita, yaitu untuk mendukung konektivitas sebesar Rp38,6 triliun (23,3 %), mendukung keseimbangan antar wilayah Rp 37 triliun (22,3 %), mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp 60,9 triliun (36,7 persen), serta mendukung peningkatan kualitas hidup Rp 29,4 triliun (17,7 persen).

Mei 2016

BPIW Koordinasikan Rencana Pembangunan Anjungan Cerdas di Bali



Untuk lebih memantapkan proses pengadaan tanah terkait rencana pembangunan Anjungan Cerdas Bahari Rambut Siwi di Provinsi Bali, Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan rapat koordinasi, di Denpasar Bali, Kamis (12/5). Rapat koordinasi tersebut melibatkan instansi terkait, salah satunya Pemerintah Provinsi Bali.

Anjungan Cerdas yang merupakan salah satu bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 15 Gilimanuk – Denpasar – Padang Bay, nantinya akan dibangun dengan menggunakan aset tanah Pemerintah Provinsi Bali seluas 2 Ha. Untuk itu, didalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pengelolaan aset dan operasionalisasinya agar tidak menimbulkan permasalahannya dikemudian hari.

Saat membuka acara tersebut, Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, I Gde Wayan Samsi Gunarta menyatakan bahwa Anjungan Cerdas yang diadaptasi dari konsep Michino-Eki yang merupakan Road Side Station yang dikembangkan di Jepang. Konsep tersebut dianggap cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Pembangunan Bendungan Tugu Sudah Mencapai Lebih Dari 40%

Pemerintah terus melakukan percepatan proses pembangunan 65 bendungan. Salah satu diantaranya adalah pembangunan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hingga saat ini progress pembangunan bendungan tersebut mencapai lebih dari 40%. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak Kementerian PUPR dalam kunjungannya ke Bendungan Tugu, Jumat (20/5).

Dardak menilai Bendungan Tugu memiliki potensi besar dalam



mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan di daerah sekitarnya. Apalagi Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang memiliki intensitas air yang jarang teratur. Dalam kunjungan Dardak beserta rombongan tersebut diketahui bahwa dua saluran penyelak Bendungan Tugu sepanjang 600 meter sudah hampir selesai. Saluran penyelak itu sendiri berfungsi untuk membuang air sungai yang lama, kemudian dielakkan melewati bangunan saluran penyelak yang kongkrit.

BPIW Menuju Instansi yang Berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



Sebagai salah satu langkah menuju terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju status sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Demikian disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Netti Malemna, saat rapat pembahasan unit kerja yang diusulkan menjadi Unit Pembangunan Zona Integritas Menuju (WBK) dan (WBBM) di Lingkungan BPIW yang dihadiri oleh Sekretaris BPIW dan jajaran Eselon III BPIW, Jumat. (27/5)

Lebih lanjut Netti menjelaskan untuk menuju WBK dan WBBM tersebut

ada beberapa langkah-langkah pembangunan Zona Integritas yang harus dilakukan oleh BPIW. Langkah-langkah tersebut adalah menetapkan unit kerja yang akan dijadikan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Selain itu menetapkan rencana kerja Reformasi Birokrasi untuk unit kerja Zona Integritas, pelaksanaan rencana kerja, dan mengukur indikator pengungkit dan indikator hasil yang dicapai. Setelah itu, melakukan monitoring dan evaluasi atas indikator hasil dan pengungkit yang dicapai. Selanjutnya, mengajukan usulan untuk dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kunjungi BPIW, Dewan Perwakilan Daerah RI Bahas Pembangunan Infrastruktur di Pulau Sumatera



Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rabu (11/5). Dalam kunjungan tersebut dibahas mengenai masalah pembangunan di Pulau Sumatera.

Saat menerima kunjungan itu, Kepala BPIW Hermanto Dardak menjelaskan fokus pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui pendekatan pengembangan wilayah yang dibagi menjadi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dengan pengembangan wilayah ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah. Salah satu wilayah pertumbuhan di Pulau Sumatera yang menjadi fokus pembangunan yaitu WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru dengan Kuala Tanjung sebagai Hub atau pelabuhan penghubung. Agar kawasan tersebut bisa tumbuh, maka dibutuhkan back bone atau tulang punggung berupa jalan tol Dumai-Pekan Baru dan akses feeder ke Prapat. Sehingga semua kawasan pertumbuhan menjadi satu kesatuan wilayah, dan masing-masing wilayah memiliki daya saing.

Kunjungi BPIW, Bupati Jember Konsultasikan Tiga Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Bupati Jember, Jawa Timur, Hj. Faida beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Senin (1/2). Kunjungan tersebut bertujuan untuk



berkonsultasi terkait tiga prioritas rencana pembangunan beberapa infrastruktur di daerahnya.

Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengusulkan untuk membangun jalan lingkar luar, yang akan memberikan dampak terhadap pelebaran kota. Jalan lingkar luar ini sekaligus melewati Bandara Notohadinegoro. "Jalan lingkar luar ini dirancang empat lajur untuk mengantisipasi kendaraan berat yang melewati jalur tersebut, sehingga tidak mengganggu jalan perkotaan dan tidak merubah struktur yang sudah ada, sekaligus meningkatkan kapasitas yang sudah ada," jelas Dardak. Ia berharap pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilakukan dapat membantu distribusi barang dan jasa serta meningkatkan potensi daerah Jember. Pada akhirnya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur di Perbatasan Papua dengan Papua New Guinea, Melalui Program Wilayah Pengembangan Strategis



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Penanganan infrastruktur yang merupakan amanah dari Nawacita ini, dilakukan dengan pendekatan program Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Penanganan wilayah perbatasan tersebut untuk mendukung pertahanan keamanan dan

pengembangan wilayah.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat berbicara pada Forum Koordinasi Peningkatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Merauke, Rabu (27/4).

Lebih lanjut Dardak menjelaskan kawasan perbatasan di Papua tercakup dalam WPS 34 yakni Jayapura-Merauke. Dalam WPS ini memerlukan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke, sepanjang 1.105 km. "Pengembangan kawasan perbatasan akan mendukung pertahanan dan untuk keamanan dan sekaligus untuk pengembangan wilayah, dengan mempertimbangkan satu hal, bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Dardak. Penataan kawasan perbatasan antara lain dengan pembangunan Pos lintas batas negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan PLBN termasuk penyediaan infrastruktur dasar.

Kementerian PUPR Bangun Lebih dari Seribu Kilometer Jalan Pararel Perbatasan di Papua



Dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pada tahun 2016 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan baru sepanjang 420 km. Jalan yang sedang dibangun maupun tahap rencana pembangunan tersebut termasuk juga kawasan perbatasan. Khusus untuk program penanganan jalan perbatasan Papua, saat ini total panjang jalan pararel perbatasan mencapai 1.105,08 km. Sementara total panjang jalan terbuka/tembus sepanjang 800,58 km. Dijadwalkan jalan sepanjang 230,50 km (segmen 2) akan diselesaikan setelah Tahun 2019.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II bagi Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2015, di Jakarta, Sabtu (28/5). Kegiatan yang diadakan Kementerian Dalam Negeri ini juga dihadiri Bupati dan Walikota dari 31 Provinsi se-Indonesia.

Selain itu Dardak menyatakan untuk mendukung konektivitas pada tahun ini dibangun jalan tol yang dibangun sepanjang 26 kilometer. Pembangunan jalan tol tersebut dengan dukungan APBN.

Kementerian PUPR & Kementerian Desa PDTT Koordinasikan Pembangunan di Pulau Terluar & Perbatasan



Nawacita mengamanatkan pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Saat ini terdapat sembilan kawasan perbatasan yang menjadi perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sembilan kawasan tersebut yakni kawasan Aruk di Kabupaten Sambas, Entikong di Sanggau, Sebatik Tengah di Nunukan, Long Apari di Mahakam Hulu, Nanga Badau di Kapuas Hulu, Motamasin di Kab. Malaka, Motaaini di Belu, Wini di Timur Tengah Utara dan Skouw di Jayapura.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hermanto Dardak, saat membahas dukungan infrastruktur PUPR pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dengan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Suprayoga Hadi di Jakarta, Selasa (17/5).

"Pintu-pintu perbatasan yang akan didukung adalah pembangunan pintu perbatasan Aruk, Entikong dengan pintu lintas batas yang dibangun empat lapis beserta jalan akses dan pintu perbatasan Sebatik Tengah di Nunukan dengan penataan pintu lintas batas beserta jalan aksesnya," jelas Dardak.

Pengembangan Kota Baru Bandar Kayangan Sebagai Global Hub di Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia



Bandar Kayangan yang berada di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dikembangkan menjadi salah satu kota baru di Indonesia. Guna menggali potensi yang dimiliki Bandar Kayangan tersebut, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) di Kota Mataram, Rabu (4/5). Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk mendukung pengembangan Bandar Kayangan sebagai kota baru.

Daerah tersebut memiliki potensi yang sangat strategis, karena berada di jalur strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama pada ALKI II. Jalur tersebut, merupakan jalur pelayaran internasional yang banyak dilintasi kapal asing, mulai dari Selat Makassar, Laut Sulawesi, hingga Selat Lombok.

Saat membuka acara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kuswardono menyatakan Kota Baru Bandar Kayangan direncanakan sebagai Global Hub, oleh sebab itu diperlukan banyak forum diskusi dengan stakeholder untuk menyamakan visi dan komitmen, guna mendukung terwujudnya kota baru tersebut.

BPIW Lakukan Rapat Penajaman Rencana Aksi Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki layanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan inovasi salah satunya pembentukan agen perubahan di tingkat Eselon I yang diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir yang mendasar. Untuk itu, BPIW melakukan rapat penajaman rencana aksi manajemen perubahan reformasi birokrasi Kementerian PUPR tahun 2016-2019, Selasa (3/5).

Kepala BPIW, Hermanto Dardak menyatakan terdapat tiga faktor penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, yaitu membangun birokrasi, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) serta membangun tata laksanaanya, sehingga akan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut Hermanto menyampaikan bahwa reformasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR bisa dilihat dari pembagian peran yang dilakukan saat ini. "Untuk planning saat ini difokuskan ke BPIW, kemudian untuk organizing dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Implementing dilakukan oleh masing-masing Direktorat Jenderal, dan controlling dijalankan oleh Inspektorat Jenderal," tutur Dardak.

Kementerian PUPR Siapkan 3 Program Pembangunan Infrastruktur di Pulau Papua



Untuk melaksanakan amanat Nawacita, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah menyiapkan 3 program pembangunan infrastruktur di Pulau Papua. Program tersebut sudah dijalankan tahun 2016 ini hingga 2019 mendatang. Sehubungan dengan hal itu Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Suahyono menjelaskan 3 program tersebut adalah mendukung konektivitas, pemanfaatan sumber daya mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, serta mendukung peningkatan kualitas hidup.

“Program mendukung konektivitas, terbagi lagi atas 3 bagian yakni konektivitas di 3 wilayah pertumbuhan, konektivitas di satu wilayah pertumbuhan sekaligus kawasan perbatasan, dan Konektivitas antar Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS dan luar WPS,” ujar Hadi saat berbicara dalam rapat tindak lanjut sinergi program pembangunan wilayah Papua untuk tahun 2016 dan 2017, di ruang pertemuan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (4/5).

Lebih lanjut Hadi menjelaskan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR berbasis pengembangan wilayah. Dari 35 WPS yang dikembangkan Kementerian PUPR, maka ada beberapa WPS yang terdapat di Pulau Papua, seperti WPS 34 Jayapura-Merauke. Dalam WPS ini memerlukan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke, sepanjang 1.105 km.

Peninjauan Kesiapan Jalur Lebaran Semarang, Cirebon dan Yogyakarta



Dalam rangka memastikan kesiapan pelayanan jalan pada arus mudik/balik lebaran tahun 2016 sesuai Instruksi Menteri PUPR menugaskan Pejabat Eselon I untuk melakukan monitoring jalur jalan yg akan dilalui oleh para pemudik. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak beserta Tim dari Ditjen Bina Marga melakukan monitoring di sepanjang ruas jalan Semarang - Cirebon - Purwokerto - Yogyakarta - Magelang selama dua hari.

Obyek tinjauan yakni pelebaran jalan di Jalan Walisongo Semarang, rekonstruksi Jalan Batang - Kendal, serta Exit Tol Brebes Timur (Tol Pejagan - Brebes). Disamping itu juga melihat lokasi 2 jembatan duplikasi yang tengah dilakukan pembangunan yakni Jembatan Sipait menghubungkan Pemalang - Pekalongan dan Jembatan Pah yang menghubungkan Pemalang - Tegal. Kondisi eksisting sudah ada jembatan yang digunakan untuk 2 arah, sehingga selesainya kedua jembatan tersebut akan melayani arus lalu lintas dari masing-masing arah.

Saat ini progres pembangunan Jembatan Sipait sudah mencapai 35.4 % dan ditargetkan dapat dioperasikan pada H-12 lebaran. “Hambatan di lapangan saat pembangunan pilar bagian barat dan bangunan bawah adalah cuaca hujan saja saat ini,” tutur Sugiyono dari PT Perencana Jaya.

Kepala BPIW Tinjau Sejumlah Infrastruktur Sekitar Kawasan Lingkar Wilis



Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur di sekitar Kawasan Lingkar Wilis Jawa Timur, Sabtu (21/5). Beberapa pembangunan infrastruktur yang ditinjau yakni pembangunan Jembatan Nglonsor, Pantai Prigi, dan Jembatan Damas. Ketiga tempat tersebut berada di Kabupaten Trenggalek. Sebelumnya, Dardak beserta rombongan meninjau pembangunan Bendungan Tugu dan lahan yang dijadikan tempat pembangunan anjungan cerdas di sekitar bendungan tersebut.

Saat meninjau pembangunan Jembatan Nglonsor tersebut, pengerjaannya masih dalam pemindahan jembatan bailey untuk akses sementara. Menurut Kepala TU Pelaksana Jalan Nasional PPK 17, Lasminto, pembangunan jembatan Nglonsor direncanakan selesai pada akhir bulan November nanti.

Tiga Strategi Kementerian PUPR Membangun Infrastruktur di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan



Jakarta – Untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan tiga strategi. Ketiga strategi tersebut yaitu pembangunan konektivitas dalam mendukung pengembangan wilayah, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat rapat Progress Report Persiapan Rapat Tim Kajian dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Kamis (12/5) mengatakan pembangunan konektivitas dilakukan untuk mendukung tiga Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang berada perbatasan darat di Kalimantan, NTT dan Papua. Menurutnya, pembangunan konektivitas berpotensi untuk mengembangkan ekonomi daerah dan mendukung pertahanan keamanan, serta pengembangan wilayah tersebut. Rapat dengan Wantimpres tersebut fokus pada pembahasan mengenai pemerataan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan tersebut.

Juni 2016

Dukungan Kementerian PUPR Terkait Pembentukan KEK Sorong dan KEK Merauke



Dalam Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 terdapat salah satu pembangunan wilayah, yakni Sorong – Manokwari, yang di dalamnya telah dibangun jalan nasional sebagai tulang punggungnya. Kemudian, dalam mendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, pada tahun ini, Kementerian PUPR sudah memprogramkan peningkatan konektivitas berupa peningkatan struktur jalan Sorong – Makbon sepanjang 3 km.

“Selain itu Kementerian PUPR sudah memprogramkan pelebaran Batas Kota Sorong – Klamono sepanjang 5 km dan peningkatan struktur jalan Lingkar Sorong menuju Pelabuhan Arar sepanjang 3,5 km,” tutur Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat mewakili Menteri PUPR pada rapat koordinasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke di Jakarta, Rabu (29/6).

BPIW Kementerian PUPR Usulkan Penyesuaian Anggaran Rp 89,8 Miliar ke DPR RI



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan penyesuaian belanja sebesar Rp 89,8 miliar dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Usulan tersebut disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (15/6).

Dardak menuturkan penyesuaian anggaran belanja dilaksanakan dengan melakukan self blocking yang terdiri atas Rp 81,2 miliar dari kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang ditunda/disesuaikan dan kegiatan sisa lelang sebesar Rp 8,6 miliar.

Lebih lanjut Dardak mengatakan anggaran BPIW mengalami penyesuaian anggaran sebesar 18%, sehingga target penyiapan piranti dimaksud sebagian ditunda dan untuk beberapa kegiatan akan dilakukan rasionalisasi.

Kementerian PUPR Siap Mendukung Pencapaian Target 20 Juta Turis Asing



Anggota Komisi X DPR RI, Ir. Bambang Sutrisno menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi harapan besar untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam mencapai peningkatan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan target 20 juta turis asing berkunjung ke Indonesia di tahun 2019 mendatang.

“Salah satu yang penting buat saya, adalah masalah infrastruktur. Kalau infrastrukturnya kurang baik, maka turis asing kesulitan untuk berkunjung ke tempat pariwisata. Saya harap anggaran Kementerian PUPR untuk pariwisata jangan sampai dikurangi, meski kami dengar semua kementerian anggarannya dipotong,” tegas Bambang saat menghadiri rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5). Sehubungan dengan hal itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mengakui bahwa akses menuju tempat wisata menjadi salah satu permasalahan yang perlu diatasi. Untuk itu menurut Dardak sejak tahun 2015 lalu, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur jalan untuk akses menuju destinasi wisata, seperti di Tanjung Lesung. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan PUPR menurutnya juga diiringi dengan pengembangan wilayah. “Jadi kami sampaikan disini bahwa kawasan-kawasan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan di beberapa daerah, kita padukan dalam suatu wilayah. Jadi diantara kawasan tadi kita interkoneksi supaya betul-betul terjadi sinergi di kawasan itu,” jelas Dardak.

Kementerian PUPR Dorong Pembangunan Kota Produktif Melalui Tata Kelola yang Baik



Beberapa kota di dunia menjadi tulang punggung yang memfasilitasi kota-kota di sekitarnya untuk tumbuh menjadi *network cities*. Beberapa diantaranya yakni Tokyo-Osaka mempunyai Shinkansen sebagai tulang punggung yang memfasilitasi kota-kota di sekitarnya. Selain itu ada koridor Boston - Washington yang memiliki jalur kereta, jalan raya dan pelabuhan yang saling terhubung.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR sekaligus Presiden Eastern Regional Organization for Planning and Human (EAROPH), Hermanto Dardak menyatakan saat ini, konsep tersebut dilakukan Kementerian PUPR dengan wilayah pertumbuhan di Indonesia. Tujuannya, agar kawasan perkotaan, Kota Baru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dapat saling terhubung melalui backbone berupa akses. Harapannya jika kawasan-kawasan tersebut saling terhubung, infrastruktur akan lebih murah, dan menjadi kota yang produktif dengan tata kelola yang baik.

Hal itu disampaikan Dardak pada acara yang diselenggarakan oleh BPIW bersama EAROPH pada Professional Forum dengan tema “Mendorong Kota Produktif dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola yang Baik” di Jakarta, Senin (13/6).

BPIW Lakukan Finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi dan Quick Wins



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi dan Quick Wins di Jakarta, Kamis, (23/6). Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris BPIW Dadang Rukmana mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal BPIW.

“FGD ini untuk memfinalkan rencana aksi kegiatan yang tertuang dalam Draft Road Map Reformasi Birokrasi BPIW Tahun 2015-2019 yang telah disusun dan membahas Quick Wins untuk BPIW,” ujar Dadang.

Lebih lanjut Dadang mengatakan Road Map BPIW mengambil base line dari hasil assesmen kesiapan organisasi, kerangka program dan kegiatan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.

BPIW Kementerian PUPR Usulkan Penyesuaian Anggaran ke DPR RI



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan penyesuaian belanja sebesar Rp 89,8 miliar dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Usulan tersebut disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (15/6).

Dardak menuturkan penyesuaian anggaran belanja dilaksanakan dengan melakukan self blocking yang terdiri atas Rp 81,2 miliar dari kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang ditunda/disesuaikan dan kegiatan sisa lelang sebesar Rp 8,6 miliar.

Lebih lanjut Dardak mengatakan anggaran BPIW mengalami penyesuaian anggaran sebesar 18%, sehingga target penyiapan piranti dimaksud sebagian ditunda dan untuk beberapa kegiatan akan dilakukan rasionalisasi.

Dikatakannya juga bahwa salah satu kegiatan tahun 2016 yang telah dilaksanakan BPIW, adalah penyusunan program infrastruktur PUPR yang berbasis pengembangan wilayah melalui Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konsultasi Regional (Konreg). "Pra Konreg telah berperan sebagai wahana komunikasi antar satminkal pusat di daerah dan wahana konsolidasi antara Pusat dan daerah, jelas Dardak.

BPIW Gelar Wrap Up Meeting Terkait Dukungan Infrastruktur terhadap Kawasan Pariwisata

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan *Wrap Up Meeting Pre-Appraisal Mission* terkait dukungan infrastruktur terhadap Kawasan Pariwisata, di Ruang Rapat BPIW, Selasa (21/06).

Saat membuka acara tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Ridwan Djamiluddin, menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan wrap up meeting ini adalah tim *World Bank* menyampaikan hasil identifikasi selama *Pre-Appraisal Mission* yang berlangsung pada tanggal 9 -21



Juni 2016. Selain itu ia berharap ada kesepakatan time frame terkait rencana tindak lanjut penyiapan program *Infrastructure for Tourism*. Sementara tujuan dari *Pre-Appraisal Mission* adalah melakukan penilaian teknis terhadap identifikasi program - program, termasuk kerangka pembiayaan, hasil, dan evaluasi ekonominya. Kemudian juga mendiskusikan langkah-langkah untuk menangani isu-isu utama, mengajukan penilaian sistem fidusia dan penelaahan lingkungan serta sosial. Selanjutnya juga menyepakati jadwal untuk langkah-langkah selanjutnya termasuk identifikasi sumber daya yang dibutuhkan.

Konsensus Stakeholder Dibutuhkan Dalam Pengembangan Kawasan Terpadu Pariwisata Nasional



Perencanaan pengembangan kawasan terpadu pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dapat diwujudkan dengan cara membuat konsensus antar stakeholder di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten dalam menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. Stakeholder tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak, saat menjadi salah satu pembicara pada *Round Table Discussion (RTD)* Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV yang diadakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di Jakarta, (23/6). Diskusi itu mengambil tema Pengembangan Pariwisata dalam Pembangunan Ekonomi.

Lebih lanjut Dardak menjelaskan bahwa perencanaan tersebut dapat pula diwujudkan dengan cara identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, seperti bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan anjungan cerdas. Selain itu perlu disiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu dengan membuat master plan untuk Kawasan Pariwisata Strategis. Dalam paparannya, Dardak memberikan gambaran skenario konektivitas pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba melalui WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru. Dardak menjelaskan, saat ini sedang dibangun tulang punggung dari WPS tersebut berupa jalan tol yang menghubungkan Medan menuju Sibolga dan Medan menuju Pekanbaru.

Maja menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan di bagian Barat Kawasan Metropolitan Jabodetabek,” tutur Basuki.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak menambahkan pengembangan Jabodetabek dilakukan sisi barat dan timur, dikarenakan pesatnya pertumbuhan berbagai kegiatan industri yang membawa implikasi pada meningkatnya kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, terutama bagi karyawan dan buruh. Oleh sebab itu, pengembangan Maja akan menggunakan konsep yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Juli 2016

Menteri PUPR Tandatangani Kesepakatan Bersama Pengembangan Kota Baru Publik Maja



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Kota Baru Publik Maja, bertempat di Kementerian PUPR, Senin (27/6). Penandatanganan juga melibatkan pemerintah daerah, yakni Gubernur Jawa Barat yang diwakili Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wawan Ridwan, Gubernur Banten yang diwakili Sekda Provinsi Banten, Ranta Soeharta, Bupati Bogor yang diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiyah, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Para pengembang juga turut melakukan penandatanganan yakni Perum Perumnas, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Nusa Graha Perkasa, dan PT Hanson International Tbk.

Penandatanganan tersebut merupakan langkah percepatan dan juga merupakan awal dimulainya kembali pembangunan Kota Baru Publik Maja, yang sempat tersendat pada tahun 1994 lalu. Basuki berharap semua pihak yang melakukan penandatanganan ini, dapat berkomitmen membangun Kota Baru Publik Maja hingga berakhirnya kesepakatan yakni pada tahun 2019 mendatang. “Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam percepatan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai juga dengan pesan Nawacita dan Amanat RPJMN 2015-2019 yakni pembangunan 10 Kota Baru Publik, dimana

Kementerian PUPR Berkomitmen Mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan



Pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu pilar pembangunan perkotaan yang sangat penting di Indonesia, untuk merespon tantangan urbanisasi dengan segenap kompleksitas permasalahannya. Pada saat ini tidak kurang 53% penduduk Indonesia telah bermukim pada kawasan perkotaan, artinya telah berkembang 6 kali lipat dari awal tahun 1970-an.

Kota Cerdas Berkelanjutan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan ruang perkotaan yang berkualitas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat yang aman, sehat, dan berkeselamatan. Kawasan perkotaan perlu memiliki 20% Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH), 20% jalan dan *pedestrian*, dan pengelolaan sampah yang baik. Tujuannya adalah menciptakan ruang perkotaan yang estetik, bersih, berkarakter, dan nyaman, antara lain dengan mengembangkan ruang-ruang publik yang memadai sekurangnya 40%. Kementerian PUPR berkomitmen dalam membangun negeri yang lebih baik, melalui pembangun infrastruktur, termasuk mengembangkan *smart city*.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), DR. Ir. A. Hermanto Dardak saat menyampaikan *Keynote Address* pada kegiatan “Geosmart 2016” di Surabaya, Kamis, (21/7). Event internasional ini diselenggarakan oleh Smart Indonesia Initiative (SII) mengambil tema “*Smart City Forum Advancing Society*”.

Berbicara di Forum PrepCom 3 UN-Habitat, Kepala BPIW Paparkan Kota Cerdas Berkelanjutan



Pengembangan perkotaan di Indonesia difokuskan pada kota cerdas berkelanjutan atau sustainable smart city. Dalam membangun kota tersebut mengacu pada 35 wilayah pertumbuhan atau yang disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat menjadi salah satu *responses from the panel* pada *side event* di acara PrepCom 3 Habitat III, yang digelar United Nations (UN) di Surabaya, Rabu (27/7). Diskusi tersebut mengambil tema *Implementing The New Urban Agenda Through Transformative National Urban Policy* atau Penerapan *New Urban Agenda* melalui Transformasi Kebijakan Nasional terkait Perkotaan.

Lebih lanjut Dardak mengatakan bahwa di masing-masing wilayah pertumbuhan banyak kawasan pertumbuhan berupa kota, baik kota sedang, kecil, kota besar, maupun kota metropolitan. Dalam kawasan tersebut juga ada kawasan perdesaan, dimana Kementerian PUPR juga mendukung infrastruktur jalan agar produksi pangan di perdesaan dapat dipasarkan.

Kementerian PUPR dan Kementerian Perindustrian Bersinergi Mendukung Pengembangan Kawasan Industri



Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mengatakan Kementerian PUPR bersama Kementerian Perindustrian bersinergi mendukung pengembangan Kawasan Industri. Sinergi tersebut dalam hal penetapan daerah mana saja yang dikategorikan sebagai Kawasan Industri oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian PUPR mendukung dari segi infrastruktur.

“Dalam kurun waktu 2015-2019, pembangunan infrastruktur PUPR menerapkan pendekatan yang berbasis pengembangan wilayah yang dituangkan dalam 35 wilayah pertumbuhan. Artinya, *carrying capacity* suatu wilayah yang baik dipadukan dengan *market driven* dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tutur Dardak pada *Forum Group Discussion (FGD)* Pengembangan Industri Logam Dasar dan Kawasan Industri yang Terpadu, di Jakarta, Rabu, (20/7).

Kementerian PUPR Kembangkan Infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus di Merauke



Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang melakukan pengembangan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Merauke, Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak pada rapat koordinasi terkait tindak lanjut pengembangan KEK Merauke dan Sorong, di Jakarta, Rabu (20/7).

Dardak menyampaikan bahwa untuk prioritas I yakni pengembangan jalan dari Merauke-Tanah Miring sepanjang 27 kilometer, Tanah Miring-Kaliki sepanjang 37 kilometer dan Kaliki-Nakias-Wanam sepanjang 219 kilometer dan prioritas II, akan dibangun akses dari poros Merauke menuju Wanam dan beberapa muara sungai. Sementara pada poros koridor dengan panjang jalan mencapai 38 kilometer masih belum tersambung dan terdapat 12 Jembatan.

“Perlu ada prioritas dari segi tahapan penetapan lokasi agar lebih efisien dan jelas, siapa yang akan melakukan apa, sehingga prosesnya tidak terhenti di tengah jalan,” kata Dardak.

BPIW Luncurkan Buku Terjemahan dari PBB Terkait Perencanaan Perkotaan



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR meluncurkan dua buku terkait perencanaan perkotaan, pada saat *Parallel Event* tentang Inovasi Pembangunan Kota dan Wilayah Berkelanjutan, di Surabaya, (27/7). Kegiatan tersebut dilakukan disela-sela Preparation Committee 3 Habitat III *United Nations* (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Buku yang diluncurkan ini merupakan buku terjemahan dari buku yang dikeluarkan PBB. Tiga buku tersebut berjudul "Perencanaan Kota untuk Para Pemimpin Kota", "Perencanaan Kota dan Wilayah", dan "Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah: Kumpulan Praktik-Praktik Inspiratif".

Saat memberikan kata sambutan mewakili Kepala BPIW, Hermanto Dardak, Kepala Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginangin menjelaskan buku-buku tersebut merupakan terbitan UN-Habitat tahun 2013. Kementerian PUPR menurutnya sudah mendapatkan izin dari *Secretary General of UN-Habitat* untuk menterjemahkannya pada pada 27 Juli 2016 lalu. Menurut Rezeki, tiga buku tersebut sangat penting sekali untuk disebarluaskan, terutama bagi pelaku pembangunan. "Buku ini diharapkan sebagai panduan yang konseptual dan praktis dalam merespon tantangan perkotaan yang semakin kompleks," tuturnya. Dengan adanya panduan melalui buku ini dia berharap para pemimpin daerah, dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan tata kelola kota yang baik, untuk mewujudkan kota cerdas berkelanjutan.

Pedoman Terkait Perkotaan dan Perencanaan Wilayah dari PBB, Dapat Diterapkan di Indonesia



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation* telah mengeluarkan buku tentang Pedoman Internasional tentang Kota dan Perencanaan Wilayah atau *International Guidelines on Urban and Territorial Planning*. Buku yang menjadi pedoman untuk seluruh negara di dunia tersebut, menurut Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono, buku tersebut sangat relevan bagi Kementerian PUPR dan *stakeholder* untuk diterapkan di Indonesia. Pasalnya dalam pedoman itu, disebutkan mengenai pengembangan kota dan wilayah yang dilakukan secara terpadu.

Saat ini pedoman tersebut telah diterjemahkan oleh BPIW dengan judul "Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah: Kumpulan Praktik-Praktik Inspiratif". Buku ini akan diberikan kepada pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Dengan pedoman itu, maka ia berharap pembangunan perkotaan dan wilayah dapat terpadu.

Agustus 2016

BPIW dan BPTJ Lakukan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Jabodetabek



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), terkait Program dan Kegiatan Pengembangan kawasan Jabodetabek, di Gedung BPIW, Kamis (4/8). Pada rapat tersebut, Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengungkapkan bahwa saat ini instansinya sedang merancang *development plan*, untuk mengurai permasalahan kawasan perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Konsep yang digunakan dalam mengurai permasalahan di kawasan ini adalah *simple rules* tentang perkotaan, seperti fungsi pelayanan perkotaan yang dibagi menjadi dua bagian yakni ke dalam sebagai *human scale* dan ke luar sebagai *network cities*. "Target restorasi perkotaan adalah menuju kota yang yang aman, sehat, berkeselamatan, dan estetik," jelas Dardak.

Lebih lanjut Dardak menjelaskan mengenai arahan rencana pengembangan sistem konektivitas di Kawasan Cikarang – Bekasi – Laut (CBL), dimana saat ini sedang dalam rencana pembangunan

Jalan Tol Cikarang – Cibitung – Tanjung Priok sepanjang 28,15 km, dan Cilincing – Tanjung Priok sepanjang 11,5 km, serta Cijago – Cibitung – Cilincing sepanjang 58,75 km.

Pembangunan Infrastruktur PUPR, Pangkas Jarak Tempuh Menuju Kawasan Pariwisata Danau Toba



Danau Toba akan menjadi basis pariwisata pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Metro Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru. Pembangunan infrastruktur menjadi yang paling vital dalam pengembangan kawasan pariwisata andalan Sumatera Utara tersebut. Pada kawasan tersebut sedang dilakukan proses konstruksi Jalan Tol Medan – Sibolga pada ruas Medan – Tebing Tinggi sepanjang 54 km. Dengan pembangunan jalan tol itu akan memangkas jarak tempuh hingga 40 menit, yang sebelumnya memakan waktu 2 jam jika melewati jalan nasional.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menghadiri Musyawarah Masyarakat Adat Batak di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (30/7).

Pada acara yang diikuti 213 Marga Batak tersebut, Dardak menjelaskan bahwa saat ini juga sedang dilakukan *Feasibility Study* (FS) atau studi kelayakan dalam pembangunan jalan tol ruas Tebing Tinggi – Pematang Siantar pada ruas Pematang Siantar – Parapat yang akan diusulkan dibangun pada tahun 2017. “Kedua ruas tersebut akan menghemat waktu sampai dengan kurang lebih 1 jam dari Tebing Tinggi menuju Danau Toba,” tutur Dardak.

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Bakal Dipercepat



Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan melakukan percepatan pembangunan jalan tol Trans Jawa, yakni Brebes-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang guna mengantisipasi adanya kemacetan parah di pintu tol Brebes Timur seperti saat arus mudik Lebaran 2016.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mewakili Menteri PUPR di hadapan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat Rapat Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transfortasi Arus Mudik Lebaran 2016 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Pada rapat tersebut hadir perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta para mitra kerja Komisi V DPR RI di antaranya pengelola jalan tol, PT Angkasa Pura, PT Pelni, PT Kereta Api dan sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Indonesia Air Asia dan Lion Air.

Kementerian PUPR Bangun Konektivitas Kawasan Perbatasan Hingga Trase Outer Ring Road di Kalimantan Barat



Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR mendukung konektivitas antar wilayah, terutama di Kalimantan Barat, mulai dari Temajo sampai Badau hingga berbatasan dengan Kalimantan Timur. Kawasan tersebut memiliki panjang kurang lebih 850 km. Menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, hingga saat ini masih ada jalan yang belum tersambung, yakni sepanjang 40 km. Sedangkan dari Tanjung ke Entikong kondisi jalan relatif sudah baik, namun sedang dilakukan pelebaran dari Balai Karangan ke Entikong. “Pembangunan sedikit terhambat dengan lahan yang masuk ke dalam wilayah hutan lindung. Ini yang sedang kita upayakan untuk diselesaikan. Kita berharap DPR RI dapat membantu menyelesaikan masalah tanah untuk dua kawasan, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan taman nasional,” ujar Dardak, saat mendampingi Komisi V DPR RI yang melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, di Pontianak, Senin, (1/8).

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pembangunan Jembatan Kapuas III yang menghubungkan Sungai Rengas dan Wajok Hulu. Panjang jembatan yang terdiri dari dua bagian ini diperkirakan mencapai 3,1 km. Jembatan ini merupakan bagian dari Rencana Trase *Outer Ring Road* Kota Pontianak.

BPIW Bakal Terbitkan Kamus Pengembangan Wilayah



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menerbitkan buku "Kamus Pengembangan Wilayah". Hal tersebut terungkap dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Kamus Pengembangan Wilayah yang dibuka langsung Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana di Jakarta (25/8).

Dadang mengatakan, kamus tersebut diharapkan akan menjadi referensi terminologi bagi stakeholder pembangunan di Indonesia. "Kamus pengembangan wilayah ini kelak diharapkan dapat mempermudah komunikasi antara akademisi, pemerintah, parlemen, maupun masyarakat tentang istilah-istilah yang digunakan dalam pengembangan wilayah," ungkap Dadang.

Menurunya, saat ini memang dibutuhkan satu referensi penyeragaman terkait pengembangan wilayah, agar istilah terkait pengembangan wilayah definisinya sama. "Kamus khusus di bidang pengembangan wilayah ini ditujukan juga untuk mempermudah penyampaian kepada masyarakat luas mengenai bahasa-bahasa yang ada di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya BPIW," papar Dadang.

Anggota EAROPH Diharapkan Dapat Menerapkan Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Negara Lain



Kemajuan suatu negara diharapkan dapat diadaptasi dan diterapkan negara lain yang belum terlalu maju. Misalnya, Jepang yang sukses menerapkan *compact city*, yakni kota berkepadatan penduduk tinggi, namun dapat diefisiensikan dengan bangunan vertikal, sehingga memiliki ruang terbuka yang lebih luas untuk dimanfaatkan transportasi dan ruang terbuka hijau.

Demikian diungkapkan *President East Regional Organization for Planning and Human Settlement* (EAROPH) periode 2014-2016, Hermanto Dardak saat membuka pada *49th Executive Committee Meeting dan 25th World Congress and Council Meeting* yang digelar di Kota Kinabalu, Malaysia, 8-10 Agustus 2016.

Sementara itu, pada *World Congress and Council Meeting* dengan tema "Our Urban Futures: Sustainable and Resilient" menelaah kembali hasil kongres EAROPH tahun 2014 lalu, dimana banyak negara yang sudah menerapkan perencanaan kota dan pemukiman, diantaranya manajemen aset di Australia, *compact city* di Jepang, Kota Cerdas di Korea, Perencanaan berbasis masyarakat di Malaysia, perumahan rakyat di Philipina, serta kota terpadu di Indonesia. Berdasarkan implementasi negara-negara *best practice* tersebut, EAROPH dinilai telah memberikan kontribusi dalam *Prepcom 3 UN Habitat III*. Rangkaian acara tersebut dimulai dengan *Executive Committee Meeting* pada hari pertama yang diikuti perwakilan dari masing-masing negara anggota EAROPH antara lain, Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Australia, Malaysia, dan Philipina.

Masing-masing negara tersebut melaporkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di perkotaan serta mempromosikan perencanaan perumahan masing-masing negara anggota.

Pada *World Congress and Council Meeting* juga membahas penetapan YB Tan Sri Nor Bin Omar dari Malaysia sebagai Presiden EAROPH periode 2016-2018. Turut hadir dalam acara tersebut, Datuk Halimah Mohd Sadique selaku Wakil Menteri Kementerian Perkotaan, Perumahan, dan Pemerintah Daerah Malaysia, YBHG Datuk Mohammad Mentek selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perkotaan, Perumahan, dan Pemerintah Daerah Malaysia, YBHG Datuk Yeo Boon Hai, selaku Walikota Kota Kinabalu, YBHG. Dato' DR Dolbani Mijan selaku Direktur Departemen Federal Urusan Perkotaan dan Perencanaan Semenanjung Malaysia, Tuan Rayman Bin Loudrize selaku Deputy Sekretaris Pemerintah daerah dan Perumahan. InfoBPIW)

Peluang Investasi Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Makin Terbuka

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan peluang peranan badan usaha atau swasta makin terbuka dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Terlebih, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memaparkan "Peningkatan Peran Badan Usaha Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol" pada acara *The 2 Executive Briefing: Improving the Role of Private Sector to Accelerate Infrastructure Services Sector Development (Maritime, Energy and Construction Services)* yang digelar *Indonesia Services Dialogue Council* di Jakarta, Senin (15/8/2016).

Dari total kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp 5.519 triliun, lanjut Dardak, dukungan dari pemerintah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharap mencapai



Rp 2.216 triliun atau 40,1%, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 545 triliun atau 9,9%, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 1.066 triliun atau 19,3%, serta sektor swasta mencapai Rp 1.692 triliun atau 30,7%.

Pegawai BPIW Perlu Memiliki Jiwa Kepemimpinan



Capacity building bagi para pegawai Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan *sense of belonging*. Jiwa kepemimpinan juga penting dimiliki, karena BPIW sebagai lembaga yang membuat perencanaan, juga harus mewujudkan keterpaduan antar satminkal di lingkungan Kementerian PUPR dan menjalin komunikasi dengan sektor lain.

Demikian disampaikan Kepala BPIW, Hermanto Dardak saat memberikan arahan dan membuka kegiatan kegiatan Peningkatan Kepemimpinan Insan BPIW yang mengangkat tema "*Building A Sense Of Belonging*" di Sentul, Jawa Barat, Jumat (19/8). Dalam acara yang diadakan Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat BPIW tersebut, Dardak juga menyatakan bahwa kegiatan ini juga untuk membangun jiwa managerial yang baik.

"Dalam membangun organisasi yang tergolong baru seperti BPIW, kita harus memiliki mental dan determinasi yang tinggi. Kita harus menuangkan energi yang lebih untuk memahami ruang lingkup tugas dan fungsi kita, supaya kita bisa menjelaskan kepada semua kalangan bahwa dengan program infrastruktur yang kita buat, dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujar Dardak.

BPIW Lakukan Pemantapan Konsep Rancangan Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dinilai perlu menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi badan sesuai dengan Permen PUPR No.15/PRT/M Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Hal ini disampaikan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana, saat membuka acara Pemantapan Konsep Rancangan Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Rancangan Pedoman Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR di Jakarta beberapa pekan lalu.

Menurut Dadang, saat ini belum ada kaidah pengaturan yang baku dan standar dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di lingkungan Kementerian PUPR. Maka dari itu, kedua pedoman tersebut perlu disusun. Pedoman tersebut telah termuat dalam Rancangan Kepmen PUPR tentang Program Legislasi Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2017 – 2019 dan telah tersusun rancangan awal materi teknisnya.

Kementerian PUPR Siap Dukung Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Patimban



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan segera mengirimkan surat komitmen dukungan pembangunan infrastruktur PUPR terhadap rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Patimban. Surat dukungan tersebut akan dikirimkan kepada Kementerian Perhubungan sebagai *leading sector* (sektor pemimpin) proyek pengembangan Pelabuhan Internasional Panimbang. Demikian terungkap dalam "Rapat Koordinasi Dukungan Infrastruktur PUPR terhadap Rencana Pengembangan Pelabuhan Patimban dan Kawasan Sekitarnya" yang digelar di ruang rapat BPIW Kementerian PUPR yang dipimpin langsung, Rezeki Peranginangin, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Jumat siang (26/8).

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut perwakilan dari Direktorat Jendral (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Ditjen Sumbang Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

BPIW Mendorong Stakeholder Realisasikan MoU Pengembangan Kota Baru Maja



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong para *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Kota Baru Publik Maja, untuk dapat mengimplementasikan komitmennya sesuai Nota Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pada 27 Juni 2016. Hal itu terungkap dalam acara Penyerahan Naskah Kesepakatan Bersama dan Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan Kota Baru Publik Maja yang dipimpin oleh Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana di Ruang Rapat BPIW, Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/8). Pada acara tersebut hadir para perwakilan dari *stakeholder*, mulai dari BPIW Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan, Perum Perumnas, PT Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International, dan PT Mitra Abadi Utama.

Kementerian PUPR Fokuskan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur di Bagian Timur dan Barat Indonesia



Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak mengatakan, tantangan utama yang dihadapi Kementerian PUPR adalah memfokuskan seluruh program yang ada, agar dapat membuat keseimbangan pembangunan antara kawasan di Indonesia Barat dan Timur.

"Selain itu, kualitas hidup masyarakat juga perlu benar-benar ditingkatkan dan dapat menekan urbanisasi," ungkap Dardak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir pekan lalu.

Menurutnya, sebenarnya urbanisasi adalah bentuk efisiensi yang perlu diatur, agar kota dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan.

September 2016

Kepala BPIW: Empat Elemen Dasar Kota Cerdas Berkelanjutan



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan. Konsep tersebut mensyaratkan kota memiliki empat elemen dasar, yakni Pertama, kota itu harus Aman, Sehat dan Berkeselamatan. Kedua, kota itu harus Estetik, Bersih, Berkarakter, Nyaman. Ketiga, kota harus Produktif dan Efisien. Keempat, kota harus Berkelanjutan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat memaparkan "*Identifying Challenges and Solutions in Developing Smart City for Better Tomorrow*" dalam seminar "Dukungan Pemerintah: *Smart Cities Planning and Implementation General Problems in Indonesia*" pada *Indonesia Smart City Forum* di Bandung, (2/9).

Dardak mengatakan, langkah tersebut merupakan respon dari tingginya pertumbuhan penduduk. Terlebih, peningkatan jumlah penduduk di perkotaan diprediksi akan terus berlanjut. Sehingga, kawasan perkotaan menjadi titik konsentrasi aktivitas penduduk, baik sosial dan budaya, dampak lingkungan dan kemanusiaan, termasuk kegiatan ekonomi. "Terbukti, saat ini 74% kontribusi ekonomi Indonesia berasal dari perkotaan," terangnya.

Kementerian PUPR Dukung Segitiga Pertumbuhan Potensial di Papua



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendukung pusat pertumbuhan wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang membentuk segitiga pertumbuhan potensial di Papua. Segitiga potensial tersebut yaitu Sorong sebagai basis kawasan minyak bumi, Manokwari sebagai basis untuk peternakan, dan Bintuni sebagai basis untuk kawasan industri di Papua.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan KEK Sorong dan Persiapan Rencana Kunjungan Presiden, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/9).

Dalam rapat yang dipimpin Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan, Pontas Tambunan tersebut, Dardak menjelaskan bahwa ujung tombak dari pengembangan KEK

Sorong dibagi menjadi empat wilayah pertumbuhan di Papua, yaitu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Sorong – Manokwari, WPS Biak – Manokwari – Bintuni, WPS Nabire – Enarotali – Wamena dan WPS Jayapura – Merauke. "Kawasan pertumbuhan itu meliputi kawasan perkotaan dan perdesaan, konektivitas dan pengembangan kawasannya harus on purpose dan on design," tutur Dardak.

Anggaran 2017 Kementerian PUPR Rp 105,56 Triliun



Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai "Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017" di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/9).

Pada RDP tersebut BPIW mengusulkan nota keuangan untuk tahun 2017 sebesar Rp 313 milyar. Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengakui, sejatinya pagu kebutuhan untuk kegiatan BPIW 2017 mencapai Rp 525 miliar. BPIW merencanakan berbagai efisiensi, sehingga anggaran yang diusulkan pada 2017 sebesar Rp 313 milyar. Dengan begitu ada anggaran yang berhasil dipotong sebesar Rp 211,7 milyar.

Dardak juga menjelaskan, saat ini ada empat tantangan utama dalam pembangunan nasional terkait infrastruktur, yakni Pertama, kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur menuju keseimbangan antar wilayah. Kedua, mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan maupun perdesaan dan merespon tingginya urbanisasi. Ketiga, meningkatkan konektivitas antar daerah melalui darat, laut, maupun udara untuk meningkatkan daya saing nasional, serta Keempat, pemanfaatan sumber daya dan peningkatan nilai tambah untuk mencapai ketahanan air serta kedaulatan pangan dan energi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kunjungi Surabaya, Kepala BPIW Bahas Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura



Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Balai Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), di Surabaya, Jumat (9/9). Kunjungan tersebut untuk membahas Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM), Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Khusus Madura (KKM).

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat menyampaikan rencana pembangunan KKJSM. Menurutnya untuk membangun kawasan tersebut membutuhkan tanah seluas 600 Ha. Dalam areal itu didalamnya dibagi menjadi beberapa kawasan, diantaranya kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan wisata, kawasan fasilitas umum (fasum) serta kawasan *rest area*.

Kelola Urbanisasi, BPIW Kembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan



Urbanisasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, namun perlu dikelola dengan baik, supaya mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam merespons urbanisasi salah satunya dengan mengembangkan konsep "kota cerdas berkelanjutan".

Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat menjadi pembicara dalam seminar dan loka karya

"Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Perumahan, Penyediaan Tanah dan Tata Kelola Dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Baru Publik" di Jakarta, Kamis (1/9).

Hadir sebagai pembicara pada acara yang digelar *The Housing Urban Development (HUD) Institute* bekerja sama dengan BPIW Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini, mantan Menteri Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Andrinof A Chaniago, Perwakilan Kementerian Bappenas, Hayu Parasati, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Hamdani, Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Doni Janarto, Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemrov DKI Jakarta, Osvar M Mungksa.

Indonesia-India Jajaki Kerjasama Pengembangan *Smart City*



Indonesia dan India bakal melakukan penajajakan kerjasama dalam pengembangan *smart city*. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mempercepat pengembangan kawasan perkotaan di kedua negara agar mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perkotaan. Hal itu terungkap dalam *Workshop on Indonesia-India Smart City Cooperation* sesi "*Smart City Development: Planing, Policies, and Partnership*" yang digelar Kementerian Luar Negeri di Ruang Nusantara, Jakarta, Rabu (28/9).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mengaku siap untuk melakukan penajajakan kerjasama Indonesia-India dalam pengembangan *smart city*. Dia mengharapkan, kerjasama yang akan dijalin dapat bermanfaat untuk percepatan mewujudkan *smart city* di kedua negara.

Lebih lanjut, Rido menjelaskan, saat ini Pemerintah Indonesia melalui BPIW Kementerian PUPR tengah mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan untuk perkotaan-perkotaan di tanah air.

Bank Tanah dan Konsolidasi Lahan Bisa Jadi Solusi Penyediaan Lahan Pembangunan Infrastruktur

Jakarta - Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana menilai bahwa keberadaan Bank Tanah dan konsolidasi lahan dapat menjadi solusi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya melalui Bank Tanah dapat dilakukan pemberian kompensasi lahan bagi pemilik tanah yang tidak setuju ikut serta dalam program pembangunan kepentingan umum,



sementara konsolidasi lahan bertujuan untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah dan kepentingan umum. Demikian disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Bedah Buku "Memahami Nilai Penggantian Wajar : Penilaian Terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum" karya Hamid Yusuf di Auditorium Universitas Tarumanagara, Jakarta, Senin (19/9). Dalam acara tersebut hadir pembicara lainnya dari perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BTN) Pelopor Suryo, Ahli Hukum Perdata Hanafi Tanawidjaya, dan Hamid Yusuf.

BPIW Lakukan Evaluasi Tingkat Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR 2016



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di Indonesia, agar dapat mengukur tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2016. Termasuk, memberikan rekomendasi pada tahun mendatang, agar semakin terpadu. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Harris H. Batubara saat membuka "Rapat Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2016" di Jakarta, Kamis (15/9).

BPIW Dukung Percepatan Pengembangan Kawasan Wisata di Pulau Kecil Terluar



Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan sektor pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan serta pemrograman dukungan pengembangan infrastruktur akses menuju dan lokasi kawasan wisata.

Di antaranya melakukan pengembangan sektor jalan, sektor perumahan, sektor sumber daya air dan cipta karya. Demikian terungkap dalam *Focus Group Discussion (FGD)* yang bertema "Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Wisata" yang digelar Kementerian Pariwisata di Jakarta, Kamis (15/9).

FGD yang dipimpin Tim Percepatan Pariwisata, Firmansyah Rahim ini menghadirkan narasumber, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rido Miduk.

Konstruksi Dua Anjungan Cerdas Direncanakan Mulai Dibangun Tahun Ini



Kementerian PUPR saat ini sedang memfokuskan pada rencana pembangunan anjungan cerdas di Bendungan Tugu Trenggalek di Provinsi Jawa Timur dan Rambut Siwi di Bali. Dua anjungan cerdas yang berada di jalan nasional tersebut menjadi percontohan dan direncanakan konstruksinya akan dilakukan pada tahun ini. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat memimpin rapat pembahasan perencanaan anjungan cerdas, di ruang rapat BPIW, Kamis (15/9).

Anjungan Cerdas Rambut Siwi yang berada di antara Gilimanuk dan Denpasar ini akan dibangun diatas tanah seluas 4,1 hektar, dimana 1,4 hektar merupakan tanah yang disediakan pemerintah daerah setempat dan 2,7 hektar yang telah dibebaskan Kementerian PUPR melalui BPIW.

BPIW Siapkan Desain Pengembangan Akses Jalan Pamulang Menuju Maja



Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau MoU Pengembangan Kota Baru Publik Maja telah dilakukan 27 Juni lalu. Beberapa pihak yang melakukan penandatanganan yakni dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang. Setelah dilakukan penandatanganan tersebut, terus dilakukan langkah nyata pengembangan Kota Baru Publik Maja yang berada di Provinsi Banten tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah membuat Desain perencanaan jaringan jalan mulai dari Pamulang hingga Maja, yang sedang dikerjakan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. Demikian disampaikan Kepala BPIW, Hermanto Dardak saat jumpa pers di sela-sela seminar dan lokakarya dengan tema "Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Perumahan, Penyediaan Tanah dan Tata Kelola dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan PKN/PKW dan Kota Baru (Studi: Kota Baru Publik Maja)", di Jakarta, Kamis (2/9).

Kementerian PUPR Dukung Sembilan Pengembangan Sistem Transportasi Massal di Jabodetabek

Kementerian PUPR mendukung sembilan pengembangan sistem transportasi massal di Jabodetabek. Demikian ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, dalam rapat pembahasan Sistem Transportasi Massal Terintegrasi Jabodetabek di ruang rapat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (5/9).

Kesembilan pembangunan angkutan massal tersebut yaitu *Light Rail*



Transit (LRT), Pemda DKI/JAKPRO, LRT Kementerian Perhubungan/ Adhi Karya, LRT Jababeka, *Mass Rapid Transit (MRT)*, Kereta Api Bandara (CL dan Ekspress), Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), *Automatic People Mover System (APMS)* Bandara Soekarno Hatta, *Commuter Line KCI* dan *Bus Rapid Transit (BRT)* TransJakarta.

Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi itu, Dardak menjelaskan bahwa dalam mendukung pengembangan transportasi di wilayah Jabodetabek, instansinya merencanakan pembangunan jalan bebas hambatan transisi di ruas dalam kota (radial) sepanjang 70 kilometer. "Dalam pembangunan jalan tersebut, Kementerian PUPR akan bersinergi dengan TransJakarta dalam pengadaan jalur busway dalam rencana pembangunan jalur tersebut," tutur Dardak.

BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepala BPIW, Hermanto Dardak menyatakan, selama ini Kementerian PUPR konsen mendukung pengembangan wilayah Metropolitan Cekungan Bandung, terutama Kota Bandung.

"Kementerian PUPR melalui BPIW akan terus meningkatkan perhatian dan dukungan ke wilayah Kota Bandung dalam rangka mendukung kota inti kawasan metropolitan cekungan Bandung," terang Dardak didampingi Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Hadi Sucahyono, Kepala

Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Harris Hasudungan Batubara saat menyambut kunjungan Walikota Bandung, Ridwan Kamil ke BPIW di Ruang Rapat BPIW, Selasa malam (13/9).

Hadir pada acara tersebut perwakilan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Lantik Kepala BPIW Yang Baru



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kini memiliki pemimpin baru. Sejak berdiri sejak tahun 2015, jabatan Kepala BPIW dijabat Hermanto Dardak. Namun kini jabatan tersebut dijabat oleh Rido Matari Ichwan yang sebelumnya menjabat sebagai, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi.

Pergantian 'nahkoda' BPIW ini dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (21/9). Pergantian pejabat ini berdasarkan Keputusan Presiden No.97/TPA tanggal 9 September 2016.

Selain Kepala BPIW Menteri PUPR juga melantik lima pejabat lainnya, yakni Anita Firmanti Eko Susetyowati sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Taufik Widjojono, Imam Santoso sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air menggantikan Mudjiadi, Andreas Suhono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggantikan Anita Firmanti Eko Susetyowati, Arie Setiadi Moerwanto sebagai Direktur Jenderal Bina Marga menggantikan Hedyanto W.Husaini, dan Sri Hartoyo sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya menggantikan Andreas Suhono.

Program Prioritas di Kabupaten Karimun Akan Diidentifikasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan mengidentifikasi program prioritas di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi dilakukan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten tersebut. Demikian disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan



saat menerima kunjungan Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq, di ruang rapat BPIW, Jakarta, (23/9).

Lebih lanjut Rido mengatakan pembangunan infrastruktur PUPR didasari pada program-program prioritas dari data yang valid dan update, baik dari BPIW melalui Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR maupun Pemerintah Daerah Karimun.

Meski Karimun tidak termasuk di salah satu 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Rido menegaskan Kementerian PUPR akan tetap mengawasi pembangunan infrastruktur. Dikatakannya juga bahwa Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW saat ini sedang menganalisis program prioritas di wilayah sekitar WPS. "Beberapa pulau di Karimun sudah masuk dalam WPS ke-35, karena pulau-pulau tersebut masuk ke dalam kategori pulau-pulau terluar," tutur Rido.

Oktober 2016

Kunjungi BPIW, AMRO Jajaki Peluang Kerjasama Bidang Infrastruktur



ASEAN +3 Macroeconomic Research Office (AMRO) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), guna menjajaki peluang kerjasama pada bidang infrastruktur di Indonesia. Tim AMRO yang dipimpin *Financial Specialist AMRO*, Enrico Tanuwidjaja diterima langsung Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Hadi

Sucahyono didampingi jajaran pejabat BPIW lainnya di Gedung BPIW, Senin (17/10).

Hadi mengatakan, kendati tahun 2016 ada keterbatasan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, namun Kementerian PUPR tetap bertekad memenuhi *outcome* prioritas dari program-program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR.

Menurutnya, total kebutuhan Kementerian PUPR berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015–2019 mencapai Rp 931,5 triliun. “Saat ini APBN yang diterima oleh Kementerian PUPR pada tahun 2015–2017 sebesar Rp 320,8 triliun, sehingga masih ada gap (kekurangan,-red) pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 610,7 triliun untuk tahun 2018–2019,” papar Hadi.

BPIW Dorong Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Laut di Batam – Bintan



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembangan infrastruktur di Pulau Batam dan Bintan. Letak geografis dua wilayah tersebut dikelilingi lautan, sehingga konektivitas laut perlu dikembangkan dalam menghubungkan antar pulau di kawasan itu.

Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin saat membuka *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Implementasi Keterpaduan Program Kawasan Strategis Wilayah, di Batam, akhir pekan lalu.

Rezeki juga mengatakan arah pengembangan infrastruktur PUPR yakni, meningkatkan keterpaduan pengembangan infrastruktur. Kemudian, mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. “Selain itu kita mengembangkan jaringan jalan, serta mendukung pengembangan perumahan dan kawasan perkotaan,” jelasnya.

Kementerian PUPR Dukung Pembangunan Infrastruktur Kepulauan Riau melalui WPS 3 Batam - Tanjung Pinang

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung BPIW, Jakarta, Jumat siang (30/9). Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Kepri, Kementerian



PUPR melalui BPIW mendukung pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepri. Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana mengatakan, saat ini Provinsi Kepri masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 3 Batam-Tanjung Pinang. Menurutnya, pada WPS 3 terdapat potensi pengembangan kawasan industri dan pariwisata. “Yakni pengembangan Kawasan Kabil Industrial Park dan Kawasan Pariwisata Bintan,” terang Dadang. Dalam Kawasan Kabil Industrial Park terdapat 32 perusahaan besar yang menempati kawasan seluas 287 hektare.

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Infrastruktur Belitung



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur di Kabupaten Belitung. Hal itu terungkap saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung melakukan kunjungan kerja ke kantor BPIW Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis (13/10).

Rombongan kunjungan kerja yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani itu diterima langsung Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan.

“Dukungan itu termasuk untuk pengembangan Pulau Karantina,” ungkap Rido yang didampingi Sekretaris BPIW Dadang Rukmana, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Rezeki Peranginangin, serta jajaran pejabat BPIW lainnya.

Tema Hari Habitat Dunia: Perumahan Penggerak Kota Berkelanjutan



Hari Habitat Dunia (HHD) diperingati setiap Senin pertama Bulan Oktober. Pada tahun ini diperingati pada tanggal 3 Oktober. Peringatan HHD di Indonesia mengambil tema "Perumahan, Penggerak Kota Berkelanjutan". Sementara tingkat dunia mengangkat tema "Housing at The Centre".

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mengatakan tema tersebut mengandung pesan, bahwa pembangunan perumahan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, yaitu sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. "Pembangunan perumahan tidak bisa dilakukan secara eksklusif, tapi harus terintegrasi dalam sistem pembangunan perumahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah," ujar Rido saat menjadi narasumber dalam talkshow "Bincang Kita" di Kompas TV yang mengangkat tema "Peringatan Hari Habitat Dunia 2016", Senin pagi (3/10). Pada acara tersebut hadir juga sebagai narasumber Wali Kota Makasar, Muhammad Ramdhan Pomanto.

Lebih lanjut Rido mengatakan, HHD perlu diperingati untuk bersama-sama memikirkan kondisi pemukiman serta mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni untuk semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. "Serta meningkatnya tanggung jawab bersama untuk masa depan habitat manusia yang lebih baik," papar Rido.

BPIW Finalisasi Masterplan dan Development Plan Pengembangan Empat Kawasan Perkotaan dan Tiga Kota Baru

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan melakukan finalisasi penyusunan *masterplan* dan *development plan* untuk pengembangan infrastruktur PUPR di empat kawasan perkotaan yaitu Cirebon dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Pontianak dan sekitarnya, serta Bandar Lampung dan sekitarnya, sedangkan tiga kota baru yaitu kota

baru Sofifi, kota baru Maja serta kota baru Bandar Kayangan. Hal itu terungkap dalam seminar finalisasi penyusunan masterplan dan development plan yang digelar Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan di Bali, akhir pekan lalu. Seminar tersebut merupakan koordinasi yang melibatkan Kementerian PUPR, tim perumus, pemerintah daerah, akademisi, pakar dan kementerian lembaga terkait.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, seluruh rencana pembangunan infrastruktur perkotaan harus memegang prinsip Cerdas Berkelanjutan.



Pacu Pengembangan Kawasan Danau Toba, Kementerian PUPR Targetkan Akses Menuju Bandara Sibisa Dibangun Tahun 2017



Kementerian PUPR terus memacu pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba. Salah satu yang dilakukan adalah membangun akses menuju Bandara Sibisa. Ditargetkan, 2017 menandatangani rekonstruksi jalan akses bandara tersebut dapat terealisasi.

Bandara ini terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, dan terletak 10 kilometer dari Kota Parapat, Danau Toba. Sedangkan untuk saat ini masih dalam tahap trace jalan dan pembebasan lahan. Selain itu masih dilakukan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED).

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat mengunjungi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, selama 2 hari, (16-17/10).

BPIW Siapkan *Integrated Masterplan* untuk KSPN Danau Toba, Mandalika dan Borobudur



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera susun rencana pengembangan kawasan terpadu atau *Integrated Masterplan* untuk pengembangan tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yakni Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Kehadiran *Integrated Masterplan* akan mendorong terciptanya keterpaduan antar kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam pengembangan tiga KSPN prioritas tersebut. Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat jumpa pers “Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Tiga KSPN Prioritas” di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/10).

Awal 2017, Konstruksi Infrastruktur PUPR di Tiga Kawasan Pariwisata Prioritas Dimulai



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2017 akan melaksanakan konstruksi infrastruktur sekaligus menyusun masterplan ketiga destinasi pariwisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian

PUPR, Rido Matari mewakili Menteri PUPR dalam Rapat Program Pembangunan Pariwisata Indonesia yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Kantor Wapres RI, Jakarta, (21/10). Hadir pula dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman, Ruhut Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong serta jajaran dari World Bank.

Saat memberi arahan, Wapres berharap pada 2019 pengembangan tiga destinasi wisata prioritas semuanya sudah rampung. Kemudian, pengembangan kawasan pariwisata Borobudur akan diintegrasikan dengan kawasan pariwisata di sekitarnya seperti Candi Mendut, Candi Prambanan dan Keraton.

BPIW - Unisba Jajaki Kerja Sama Dalam Pengembangan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR dan Universitas Islam Bandung (Unisba) jajaki peluang kerja sama, terutama dalam hal pengembangan ahli perencanaan wilayah dan kota.

Peluang kerja sama ini terbuka lebar mengingat Unisba memiliki Program Studi (Prodi) Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK). Sementara BPIW membutuhkan ahli di bidang tersebut. Demikian yang terungkap dalam diskusi Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dengan Kepala Prodi Pasca Sarjana PWK Unisba, Dr. Ernawati dan jajarannya, saat berkunjung ke kantor BPIW, Jakarta, Selasa (25/10). Dalam kesempatan itu Rido meyakini, ke depan akan banyak hal yang dapat disinergikan dari BPIW dan Prodi Pasca Sarjana PWK Unisba..

Kementerian PUPR-Unops Jajaki Peluang Kerjasama Kembangkan Infrastruktur di Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) siap melakukan kerjasama dengan *United Nation Office for Project Services* (Unops), lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membidangi infrastruktur. Pertemuan yang membahas peluang kerjasama tersebut digelar saat Tim Unops melakukan kunjungan



kerja ke Kantor BPIW, Jakarta, Selasa (25/10)

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, Kementerian PUPR dan Unops memiliki kesamaan visi dan misi mengembangkan infrastruktur. "Kami (Kementerian PUPR,-red) mempunyai tugas dalam penyediaan air bersih, sanitasi, perbaikan area kumuh, pembuatan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Rido yang didampingi Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana dan jajaran pejabat BPIW lainnya.

BPIW Dukung Pengembangan Infrastruktur di Ternate



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur di Kota Ternate, Maluku Utara. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat menerima kunjungan kerja Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman di kantor BPIW Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (25/10).

"Pengembangan infrastruktur di Kota Ternate perlu dilakukan dengan perencanaan khusus, mengingat Ternate merupakan salah satu kota yang memiliki nilai sejarah tinggi di negeri ini" ungkap Rido yang didampingi Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana serta jajaran pejabat BPIW lainnya.

November 2016

Dibutuhkan Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi untuk Implementasikan Agenda Baru Perkotaan



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemangku kepentingan berupaya merumuskan kebijakan, strategi dan rencana aksi bersama untuk pengembangan wilayah dan perkotaan di Indonesia sesuai perkembangan global dan regional.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matahi Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat menjadi *keynote speech* pada acara "Diseminasi Implementasi Agenda Baru Global dan Nasional dalam Pengembangan Wilayah dan Perkotaan di Indonesia" yang digelar di Bali, akhir pekan lalu.

Menurut Rido, saat ini pengembangan wilayah dan perkotaan di dunia, terutama di negara berkembang berlangsung dinamis. Untuk isu perkotaan di Indonesia yang kerap muncul antara lain, persoalan banjir, genangan air, kawasan kumuh, kemacetan, sampah, serta akses air minum layak bagi masyarakat. "Terhadap Isu-isu tersebut, tentunya perlu penyelesaian saat ini dan masa depan," papar Rido.

Menteri PUPR Rotasi Pejabat Eselon II

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengingatkan kembali kepada para pejabat, bahwa sumpah yang diucapkan harus benar-benar dilaksanakan, seperti tidak melakukan korupsi dan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. "Saya mengingatkan kita semua sumpah suci dalam melandasi niat kita dalam melaksanakan tugas perjalanan kita yang penting ini," kata Basuki, saat melakukan rotasi delapan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementrian PUPR, Jumat (11/11).

Basuki juga meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah, untuk membelanjakan uang negara sesuai dengan tugas dan juga tetap hidup sederhana. Menurut Basuki, rotasi dan promosi merupakan hal yang biasa dan merupakan suatu keharusan dalam rangka untuk mendinamisasikan jalanya suatu organisasi. "Saya berharap pekerjaan tahun depan dapat lebih banyak yang dilakukan lelang dini,



sehingga pekerjaan bisa dimulai sejak awal tahun. Progres lelang dini hingga hari ini sebanyak 1.556 paket pekerjaan sudah dilelang dengan nilai Rp 8,16 triliun,” ungkap Basuki.

Dari delapan pejabat tersebut, juga dilantik beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), seperti Bobby Prabowo sebagai Kepala Pusat Perencanaan infrastruktur PUPR, dan Hadi Sucahyono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 334/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian PUPR.

Belanda Tertarik Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur

Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/11). PM Mark Rutte beserta rombongan tiba di Kota Semarang sekitar pukul 09.00 WIB menggunakan pesawat komersial. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resminya di Indonesia selama tiga hari.

Kedatangan PM Mark Rutte beserta rombongan di Kota Semarang, disambut langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta didampingi Kepala BPIW Rido Matari Ichwan, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Pusat Bendungan I Made Sumiarsih, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja.



Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mengatakan, ada banyak bangunan di Indonesia yang nilai sejarahnya memiliki arti bagi Indonesia termasuk Belanda. Sehingga, dalam upaya pelestarian dan pemeliharannya terbuka lebar untuk dilakukan kerja sama Indonesia-Belanda.

BPIW Gelar Bimbingan Teknis Keterpaduan Infrastruktur



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterpaduan Infrastruktur PUPR untuk Pulau Sumatera dan Jawa-Bali. Kegiatan yang digelar di Bali pekan lalu itu dilakukan untuk mensosialisasikan perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR.

Selain itu, untuk meningkatkan pencapaian target keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di beberapa pulau tersebut. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR harus memperhatikan keterpaduan antarsektor dan antar tingkat pemerintahan, sebagaimana yang diamanatkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR. “Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dengan berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional,” terang Hadi.

BPIW–Denmark Jajaki Pengembangan Kawasan Perkotaan Berbasis *Green-Blue Infrastructure*



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jajaki peluang kerjasama dengan Denmark. Terlebih, saat ini BPIW sedang mengembangkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kawasan perkotaan yang berbasis teknologi.

"Teknologi itu untuk memudahkan dalam mengintegrasikan ide-ide pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan," ungkap Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat menerima kunjungan Kedutaan Denmark dan Ramboll sebagai kontributor arsitektur lanskap di kantor BPIW, Jakarta, (11/11).

Rido mengatakan Kementerian PUPR pernah melakukan kerjasama dalam mengembangkan kawasan perkotaan dengan Norwegia dan Kementerian Lingkungan Hidup melalui *G2G Cooperation*. "Kerja sama seperti ini, kami berharap akan bisa diaplikasikan kembali dalam beberapa rencana pengembangan kawasan perkotaan, seperti saat ini Kementerian PUPR sedang mengembangkan 10 Kota Baru di Indonesia," tutur Rido.

Dukung Ketahanan Pangan, Kementerian PUPR Bangun Irigasi dan Waduk



Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai 2019 menargetkan pembangunan 1 juta hektare (Ha) irigasi serta rehabilitasi terhadap 3 juta Ha irigasi.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memaparkan "Sinkronisasi Pengembangan Infrastruktur Irigasi dengan Pengembangan Lahan Pertanian" dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang Indonesia di Jakarta, Senin (28/11).

Selain pembangunan irigasi, lanjut Rido, untuk penyediaan air baku dalam mendukung lahan pertanian dibangun juga 65 bendungan hingga 2019. "Sebanyak 16 bendungan merupakan proses penyelesaian proyek yang dilaksanakan sebelum periode 2015. Dan 49 bendungan merupakan bendungan baru," paparnya.

BPIW Dukung Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Daruba

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung rencana pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Daruba.

"BPIW melakukan dukungan melalui penyusunan masterplan dan *Pra Detail Engineering Design* (DED) KPPN Daruba," Kepala Pusat



Pengembangan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Draft Masterplan dan Pra DED KPPN Daruba di Morotai, beberapa waktu lalu.

la memaparkan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terdapat sasaran pengembangan penguatan terhadap 40 KPPN.

Agusta menerangkan, setiap masterplan KPPN disusun melalui beberapa tahapan, antara lain kunjungan survei lapangan dan koordinasi awal. Kemudian, kunjungan kedua untuk penajaman informasi kawasan. "Tahap berikutnya dilakukan FGD untuk menajaring masukan dari daerah guna penyempurnaan draft masterplan yang tengah disusun," paparnya.

Kementerian PUPR Kembangkan Dua Metropolitan Baru Sebagai Pusat Investasi



Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) tahun ini melakukan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru, yakni Palembang Raya dan Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado). Kedua Metropolitan Baru tersebut akan dikembangkan sebagai pusat investasi baru.

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga pengembangan itu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan perkotaan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Selain itu menurut Agusta tahun ini juga dilakukan penyusunan FS dan Pra-Desain pada Kawasan Metropolitan yakni Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang dan Tanah Karo). Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur), Cekungan Bandung, dan Kedungsepur (Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan).

Pemerintah Buka Peluang Investasi di Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung



Pemerintah membuka kesempatan bagi para investor swasta, untuk mengembangkan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Saat ini pemerintah memiliki sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi peluang investasi bagi untuk para investor tersebut. Berikut yang disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rezeki Peranginangin, saat menjadi pembicara pada acara *Indonesia Tourism Investment Business Forum*, di Tanjung Lesung, akhir pekan lalu.

BPIW Dorong Terwujudnya Kota Cerdas Berkelanjutan Melalui Kota Kompak Cerdas



Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) terus mendorong terwujudnya Kota Cerdas Berkelanjutan salah satunya melalui pengembangan Kota Kompak Cerdas. Pengembangan kota kompak cerdas merupakan amanat RPJMN buku III tahun 2015 – 2019 tentang pembangunan kota kompak dan vertikal yang juga merupakan implementasi dari standar kota cerdas berkelanjutan yang disusun BPIW. Demikian disampaikan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka acara Seminar Pengembangan Kota Kompak Cerdas, Rabu (23/11). Lebih lanjut Rido menyatakan sebuah kota memiliki peran internal

dan eksternal, dimana harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam kota tersebut dan memiliki kemampuan sistem regional atau *network cities*. Oleh karena itu, inkubasi kota kompak cerdas diharapkan dapat menjadi contoh yang dapat diduplikasi kota-kota lain, karena telah memiliki standar sebagai kota cerdas berkelanjutan. Pada tahun ini, peserta kota kompak cerdas terdiri dari 8 kota yaitu Kota Banda Aceh, Padang, Salatiga, Trenggalek, Banjarmasin, Gorontalo, Bau Bau dan Ambon. Masing-masing kota tersebut memiliki karakteristik, potensi, dan masalah yang berbeda.

Kepala BPIW Arahkan Anjungan Cerdas Adopsi Karakter dan Kearifan Lokal



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengarahkan pembangunan Anjungan Cerdas mengadopsi karakter dan kearifan lokal daerah setempat.

Hal itu terungkap saat Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dan rombongan meninjau langsung pembangunan Anjungan Cerdas di Rambut Siwi, Bali, (5/11).

Rido mengatakan, Anjungan Cerdas di Rambut Siwi berada dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Gilimanuk–Denpasar–Padang Bai akan berfungsi sebagai tempat melepas kepenatan pengguna jalan nasional sebelum melanjutkan ke tempat tujuan.

BPIW Susun Katalog Program Infrastruktur Perkotaan Menengah



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan akan menyusun katalog program infrastruktur perkotaan menengah.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, katalog program

infrastruktur perkotaan menengah tersebut diharapkan akan menjadi referensi program infrastruktur terhadap para kepala daerah.

“Baik referensi program infrastruktur waktu terdekat, jangka menengah maupun panjang,” ujar Agusta saat membuka *Focus Group Discussion* (FGD) “Prospek dan Tantangan Kota Menengah: Menuju Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan” yang digelar di Jakarta, Kamis (10/11).

Hadir sejumlah pakar dan praktisi perencanaan perkotaan sebagai narasumber dalam FGD tersebut, antara lain Hendricus Andy Simarmata, Bayu Wirawan, Ajat R Jatnika serta peserta perwakilan dari unit organisasi di Kementerian PUPR.

Agusta mengatakan, katalog yang akan disusun nantinya itu terdiri dari katalog program infrastruktur perkotaan menengah, besar dan perdesaan. “Untuk FGD saat ini kita lebih difokuskan pada rencana untuk menyusun katalog program infrastruktur perkotaan menengah,” papar Agusta.

BPIW Akomodasi Masukan Pemerintah Desa Untuk Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Tabanan



Saat ini telah disusun masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), khususnya untuk Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk lebih menyempurnakan masterplan dan Pra DED tersebut, dibutuhkan masukan banyak pihak, termasuk yang langsung bersentuhan dengan masalah perdesaan, yakni aparat desa.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Agusta Ersada, saat *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan *Masterplan* dan Pra DED Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Tabanan, di Bali, belum lama ini.

Lebih lanjut Agusta menjelaskan, masterplan yang disusun tersebut, merupakan tindak lanjut dari pengembangan KPPN. Masterplan ini menurut Agusta merupakan dokumen kesepakatan bersama yang berisi visi misi yang dijabarkan pada matriks program. “Dengan adanya intervensi bersama diharapkan masterplan yang telah disusun dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. BPIW memiliki tanggung jawab dalam menterpadukan infrastruktur yang ada,” tutur Agusta.

Menurut Agusta, Tabanan merupakan salah satu lumbung pangan di Bali, selain itu juga memiliki potensi pada sektor perkebunan, khususnya kopi. Agusta juga menyatakan bahwa sasaran

pengembangan wilayah, yaitu pertama, penguatan 40 pusat - pusat pertumbuhan baru desa - kota. Kedua, pengurangan desa tertinggal sebanyak 5 ribu desa, dan desa berkembang sebanyak 2 ribu desa.

BPIW Susun Masterplan Pengembangan KPPN Keruak-Praya



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan bekerjasama dengan Direktur Perencanaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan *Masterplan* dan *Pra Detailed Engineering Design* (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Keruak - Praya, Lombok, beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW Kementerian PUPR, Sanusi Sitorus mengatakan, pelaksana utama pengembangan KPPN Keruak - Praya adalah pemerintah daerah dan desa, sehingga diperlukan kemauan keras dan inovasi dari pemerintah daerah.

Sanusi berharap, pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Timur diharapkan lebih aktif menyampaikan masukan dalam finalisasi masterplan dan pra DED pengembangan KPPN Praya. “Kegiatan ini sebagai pertemuan final. Kemudian hasil dari pertemuan ini akan kami bawa ke pusat untuk dikoordinasikan antar kementerian/ lembaga terkait,” terangnya.

Menurutnya, konsep yang diusung dalam *masterplan* KPPN Praya adalah untuk meningkatkan nilai jual dari potensi yang ada.

BPIW Susun Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru Palembang Raya

Metropolitan Baru Palembang Raya merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Kawasan metropolitan baru tersebut mencakup Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sebagian Kabupaten Banyuasin, sebagian Kabupaten Ogan Ilir, dan sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)



Kementerian PUPR, Ir. Rido Matari Ichwan, MCP mengatakan, salah satu bentuk dukungan yang dilakukan BPIW adalah melakukan perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR terpadu di kawasan metropolitan baru tersebut.

Untuk itu BPIW akan membuat masterplan pengembangan Metropolitan Baru Palembang Raya yang dilengkapi dengan program pembangunan infrastruktur sebagai acuan dalam pengembangan infrastruktur PUPR.

Hal itu disampaikan Rido, saat pelaksanaan Seminar Pengembangan Metropolitan Palembang Raya, di Aula Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, di Palembang, Selasa (15/11). Menurut Rido seminar tersebut digelar untuk menjangar aspirasi, menyerap rekomendasi kajian, studi dan mengakomodasi masukan dari praktisi dan akademisi perencanaan perkotaan.

Desember 2016

BPIW Raih Penghargaan Pelayanan Publik Kategori Kebersihan dan Kenyamanan Terbaik



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih penghargaan kategori Kebersihan dan Kenyamanan Terbaik dalam ajang Penghargaan Pemenang Kompetisi Pelayanan Publik Kementerian PUPR 2016 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Kamis malam (8/12).

Penghargaan tersebut diterima Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan yang disampaikan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti di panggung kehormatan Gedung Auditorium Kementerian PUPR.

Prof. Anita Firmanti saat membuka Penghargaan Pemenang Kompetisi Pelayanan Publik Kementerian PUPR 2016 mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR memandang perlu untuk senantiasa mendorong dan mengapresiasi kinerja unit organisasi di Kementerian PUPR, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan infrastruktur PUPR.

New Urban Agenda Diimplementasikan dalam Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan



Amanah Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah sejalan dengan agenda global dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka seminar "Implementasi New Urban Agenda Dalam Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan (Pengembangan Kota Nasional dan Pengembangan Kota Wilayah/PKN-PKW)" di Jakarta, Selasa (13-14/12).

Agenda global tersebut, ungkap Rido, agenda yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015 yakni, *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta Konferensi Habitat III di Quito dengan menghasilkan rumusan *New Urban Agenda* (NUA) yang merupakan elemen kunci untuk mengimplementasikan SDGs. "Khususnya goal 11, yaitu membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan," ungkap Rido.

Kementerian PUPR Sosialisasikan Persiapan Penyusunan Rencana Induk Terpadu KSPN Danau Toba, Borobudur dan Lombok



Dalam menyusun Rencana Induk Terpadu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur dan Lombok sangat dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, agar hasilnya dapat efektif dan sesuai harapan banyak kalangan.

Demikian diungkapkan, Hadi Sucahyono, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat membuka sosialisasi Persiapan Penyusunan Rencana Induk Terpadu Kawasan Pariwisata Danau Toba, Borobudur, dan Lombok di Jakarta, Senin (19/12).

Hadir dalam sosialisasi tersebut perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Direktur Badan Otorita Danau Toba, dan stakeholder lainnya. Selain itu, hadir pula pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang terkait dengan tiga destinasi wisata tersebut.

BPIW Bangun Komitmen Implementasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional



Guna membangun komitmen bersama dalam mengimplementasikan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, di Bali, pekan lalu.

Rapat tersebut melibatkan instansi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemangku kepentingan di 14 KPPN. Sedangkan kementerian yang ikut hadir dalam kegiatan itu adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN, serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian PPN/Bappenas

"Kesenjangan antara kawasan perdesaan dan perkotaan semakin besar. Dengan telah dibuatnya masterplan terutama di 14 KPPN, dapat mengurangi kesenjangan tersebut," ujar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, saat memberikan sambutannya pada acara itu.

Menurut Rido, didalam masterplan juga terdapat pemberdayaan kelembagaan tingkat lokal, seperti kelompok tani atau Poktan Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Dengan kolaborasi yang baik antar kelembagaan tersebut kata Rido dapat memasarkan produk pertanian yang sudah dihasilkan ke luar kawasan, sehingga mendapatkan nilai ekonomi lebih.

Bank Dunia Mulai Lakukan *Pre-Appraisal Mission* untuk Realisasikan Pengembangan Infrastruktur KSPN



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam "Kick-Off Meeting Pre-Appraisal Mission Dalam Rangka Indonesia Tourism Development Program" di Kantor BPIW Kementerian PUPR, Selasa (6/12).

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata

Masterplan 4 KPPN yang Dibuat BPIW Dapat Menjadi Pedoman Bagi Unor Kementerian PUPR



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan masterplan dan *Pra Detail Engineering Design* (DED) 4 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yakni Morotai, Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan. Masterplan yang sudah dibuat dapat menjadi pedoman atau panduan terutama bagi unit organisasi atau unor Kementerian PUPR dalam penyusunan program dukungan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan tahun depan dan tahun berikutnya.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga, saat menggelar rapat koordinasi keterpaduan pengembangan infrastruktur pada KPPN, di ruang rapat Kementerian PUPR, Kamis (1/12).

Penyusunan masterplan dan Pra DED tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengembangan 40 pusat pertumbuhan baru serta pengurangan jumlah desa tertinggal peningkatan jumlah desa mandiri. Pada tahun 2016, telah dibuat Penyusunan masterplan dan Pra DED pada 14 KPPN oleh beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun masterplan dan Pra DED sebanyak 4 KPPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) sebanyak 6 KPPN, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebanyak 2 KPPN. Penyusunan *masterplan* dan Pra DED tersebut dibawah koodinasi Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan.

Menteri PUPR: BPIW Harus Konsisten sebagai *Integrator Program*

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meminta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai misi dari pembentukannya, yakni sebagai *integrator program*. Dengan demikian BPIW harus mengarahkan semua sektor di Kementerian PUPR untuk membuat program dan bukan mengkompilasi program dari sektor-sektor.

"Kalau masih kompilasi tidak ada artinya, karena BPIW dibentuk untuk mengarahkan ditjen-ditjen dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga BPIW menjadi yang didepan dengan membuat program yang lebih baik, bukan di belakang, konsisten dalam melaksanakan



kegiatan yakni sesuai dengan pembentukan organisasi BPIW, jangan melenceng. Mudah-mudahan Expo ini mengingatkan misi dari pembentukan BPIW," tegas Basuki, saat membuka BPIW Expo, di halaman gedung BPIW Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (16/12). Basuki mencontohkan, bila BPIW ingin membuat program dukungan pengembangan pariwisata Borobudur, maka BPIW harus mengarahkan ditjen seperti Bina Marga dalam membuat pelebaran jalan. Selain itu Basuki juga menyatakan bahwa dalam mengalokasikan anggaran juga harus rasional, sesuai dengan program yang dibuat.

Kementerian PUPR Realisasikan Dukungan Terhadap Tiga Destinasi Wisata Prioritas



Kementerian PUPR merealisasikan dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya tiga KSPN yang difokuskan pemerintah yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat). Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matarichwan menyatakan realisasi dukungan tersebut dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), dan Penyediaan Perumahan.

Dicontohkan, untuk kawasan pariwisata Danau Toba, Kementerian PUPR telah meningkatkan jalan kabupaten menjadi jalan nasional di sekitar Danau Toba. "Selain itu juga sedang disiapkan rencana pembangunan jalan tol termasuk dari Tebing Tinggi ke Pematang Siantar ke Prapat," ungkap Rido, saat menjadi salah satu narasumber pada *talkshow* yang mengambil tema "Keterpaduan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)". *Talkshow* tersebut merupakan bagian dari acara BPIW Expo yang diadakan di halaman gedung BPIW Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (16/12).



Bersinergi Mengembangkan Kawasan Perkotaan

Ir.Agusta Ersada Sinulingga, MT

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian PUPR

Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk yang tinggal kawasan perkotaan di Indonesia terus bertambah. Untuk mengendalikan kawasan perkotaan agar tidak tumbuh liar atau urban sprawl, diperlukan perencanaan yang menyeluruh dan bersinergi dengan berbagai pihak, sehingga program yang telah ditargetkan dapat tercapai dengan baik. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik kementerian lain, pemerintah daerah, maupun swasta

juga dilakukan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan, Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Ir.Agusta Ersada Sinulingga, MT. Hal itu juga dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pendanaan. Lalu, seperti apa pula program-program yang sudah dilaksanakan tahun 2016, dan apa program yang akan dilakukan tahun 2017?. Berikut petikan lengkap wawancaranya beberapa waktu lalu.

Menurut pandangan Bapak, apa tantangan dalam pengembangan kawasan perkotaan di tanah air dan bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan itu?

Pertumbuhan penduduk yang tinggal di perkotaan begitu cepat, dimana saat ini persentasenya mencapai lebih dari 50%. Sementara penyediaan infrastruktur tidak begitu cepat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu kurangnya inovasi dalam membuat terobosan-terobosan sehingga kendala keterbatasan anggaran dapat diatasi. Pemerintah daerah yang memiliki kawasan perkotaan, semestinya dapat lebih berinovasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu inovasi yang perlu digali adalah menjalin kerja sama dengan badan usaha atau pihak swasta. Dengan cara ini dapat mempercepat pengembangan infrastruktur di kawasan perkotaan, sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk di perkotaan. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan kawasan perkotaan, juga merupakan bentuk sinergi dan keterpaduan. Jadi itu salah satu jalan keluar dari tantangan keterbatasan pendanaan, dalam pengembangan kawasan perkotaan.

Setelah kurang lebih 4 bulan menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, apa yang akan Bapak lakukan terkait pengembangan kawasan perkotaan?

Seperti biasanya kalau pejabat baru menjabat, maka ia mempelajari apa yang ada dan apa yang sedang dilakukan di organisasi tersebut. Saya juga demikian. Pada awal menjabat saya mempelajari, kemudian saya mengevaluasi program-program yang sedang berjalan. Saya masuk di bulan Agustus, itu artinya semua paket kegiatan sedang berjalan. Jadi saya berusaha bagaimana caranya agar semua program yang sudah dibuat, dapat selesai di akhir tahun. Jadi saya berusaha memenuhi waktu yang sedang ditargetkan.

Hingga Desember ini, Bapak melihat apa yang sudah dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan ?

Jadi kita bekerja berdasarkan target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Jadi RPJMN ada target yakni berapa kota metropolitan yang harus kita penuhi sampai 2019, berapa kota besar, kota baru, dan berapa kawasan perdesaan. Hal itu yang saya coba selesaikan, seperti perdesaan, kita menyelesaikan 4 *masterplan* Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional atau KPPN dari total 14 KPPN yang harus diselesaikan beberapa instansi terkait termasuk Kementerian PUPR tahun di 2016. Keempat *masterplan* tersebut adalah Morotai, Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan. Dalam mendukung KPPN ini, kita selalu berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN. Secara total ada 40 KPPN yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan instansi lain tersebut hingga 2019. Jadi 2016 ini kita

selesaikan sebanyak 14 *masterplan* KPPN, tahun 2017 ditargetkan dapat diselesaikan 14 KPPN. Selanjutnya pada 2018 diselesaikan sebanyak 12 KPPN. Penyusunan *masterplan* ini dilakukan bersama-sama dengan kementerian lain. Jadi dari *masterplan* 14 KPPN tadi, kita mengerjakan 4 KPPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengerjakan 8, dan Kementerian ATR/BPN mengerjakan 2 KPPN.

Bagaimana pula dengan kegiatan lainnya, seperti kawasan metropolitan?. Bagaimana progressnya sampai saat ini?

Untuk kawasan metropolitan kita punya target 5 kota metropolitan baru. Jadi di RPJMN itu totalnya ada 12 kota metropolitan. Dari jumlah itu sebanyak 7 metropolitan sudah ada, dan 5 merupakan metropolitan baru. Kelima metropolitan baru itu adalah Banjarmasin, Manado, Padang, Palembang Raya, dan Mataram. Kemudian dari lima metropolitan baru, yang kita selesaikan *masterplannya* pada tahun ini adalah Palembang Raya dan Manado. Kemudian tahun 2017 kita rencanakan ada 1 metropolitan yaitu Banjarmasin. Tahun 2018 kita akan selesaikan *masterplan* Padang dan Mataram.

Demikian juga dengan kota baru, dimana ada 10 kota baru di Indonesia, yakni Kota

Maja, Pontianak, Padang, Palembang, Banjarbaru, Tanjung Selor, Makassar, Manado, Sorong, dan Jayapura. Dari 10 kota baru, maka yang kita kerjakan tahun 2015 dan 2016, adalah Maja, Pontianak, Palembang, dan Tanjung Selor. Kita targetkan hingga 2019, kita selesaikan 10 kota baru. Setelah membuat *masterplan*, kita berharap ada penandatanganan kesepakatan bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembangan, seperti yang telah dilakukan pada 27 Juni lalu, terkait pengembangan Kota Baru Publik Maja.

Beberapa kegiatan misalnya kita membuat *masterplan* dan *development plan* Kedungsepur. Setelah itu kita pilih kawasan prioritas. Untuk Kedungsepur, kawasan prioritasnya adalah Kabupaten Semarang. Pada kawasan ini kita ambil 40 hektar yang kita detilkan. Untuk itu kita melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Bupati setempat. Penandatanganan tersebut dilakukan agar diketahui apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, baik dari Pemerintah Kabupaten Semarang maupun Kementerian PUPR melalui BPIW. Dengan adanya penandatanganan ini, maka terlihat jelas peran dari pemerintah daerah.

Setelah *masterplan* dibuat, apa langkah selanjutnya?

Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah mengikuti bisnis proses yang ada di BPIW yakni memasukkan *masterplan* ke Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR atau biasa kita sebut Kapus 1. Dari Kapus 1, kemudian diserahkan ke Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR atau biasa disebut Kapus 2. Proses yang ada di Kapus 2 nantinya akan menghasilkan program kegiatan. Kemudian dilakukan Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg bersama unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR yakni

Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan kawasan perkotaan, juga merupakan bentuk sinergi dan keterpaduan. Jadi itu salah satu jalan keluar dari tantangan keterbatasan pendanaan, dalam pengembangan kawasan perkotaan.

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR METROPOLITAN KEDUNGSEPUR



Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan. Didalam Pra Konreg ini, kita sampaikan kepada para unor bahwa program yang dibuat harus dikerjakan. Hal ini didasari pada analisa yang kita buat.

Misalnya Ditjen Bina Marga harus membuat jalan di sebuah kota, karena kondisi kota tersebut macet. Kalau alasannya macet, kita lengkapi dengan data survei lalulintasnya, dimana setelah kita hitung kapasitas jalannya menunjukkan jalan tersebut sudah harus dilebarkan. Jadi *masterplan* yang kita buat ini benar-benar sebagai pedoman bukan sebagai kompilasi. Hal ini sejalan dengan arahan Pak Menteri PUPR saat BPIW Expo beberapa waktu lalu.

Bagaimana pula kelanjutan dari konsep Kota Cerdas Berkelanjutan? Apa sudah mulai diterapkan?

Jadi Kota Cerdas Berkelanjutan ini adalah suatu *tools* yang kita sudah sepakati. Jadi ketika dibuat *masterplan* kota metropolitan, maka harus mengadopsi konsep tersebut, seperti ruang terbuka hijau atau RTH harus diatas 20%. Jadi ketika kita merencanakan pengembangan kawasan perkotaan, konsep Kota Cerdas Berkelanjutan dengan 4 atributnya harus disertakan. Jadi ada empat pemerintah kota yang kita ajak kerja sama, yakni Kota Wonosobo, Salatiga, Semarang dan Yogyakarta. Keempat kota itu kita bantu membuat disain Kota Cerdas Berkelanjutan, dimana untuk menjadi Kota Cerdas Berkelanjutan. Sebuah kota harus memiliki unsur 'cerdas', misalnya teknologi pengolahan sampah maupun *early warning system* atau

sistem peringatan dini terhadap bencana.

Dengan cara ini kita berharap 4 kota tersebut dapat menjadi Kota Cerdas Berkelanjutan. Kota-kota lain kita juga berharap pemdanya memberi respon yang baik, sehingga dapat menjadi Kota Cerdas Berkelanjutan.

Selain melakukan berbagai kegiatan tersebut, bagaimana dengan kualitas kerja pegawai di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan ini?

Bicara soal kualitas pegawai, dapat saya katakan bahwa kita sudah memenuhi Standarisasi Manajemen Mutu atau SMM, ISO 9001 : 2015. Dengan adanya sertifikasi ini, mudah-mudahan kedepannya, dalam membuat *masterplan* dan *development plan*, sudah ada Standar Operasional Prosedur atau SOPnya. Dengan demikian ada acuannya dan kualitasnya

tidak bias. Kita akan terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang kita lakukan, dengan melakukan audit internal, sehingga kualitas kerja setiap bagian dapat dipertahankan.

Dari 10 kota baru, maka yang kita kerjakan tahun 2015 dan 2016, adalah Maja, Pontianak, Palembang, dan Tanjung Selor. Kita targetkan hingga 2019, kita selesaikan 10 kota baru. Setelah membuat *masterplan*, kita berharap ada penandatanganan kesepakatan bersama.

Bagaimana rencana program yang akan dilakukan untuk tahun 2017?

Tahun 2017, kita melanjutkan program-program perkotaan yang menjadi target RPJMN. Jadi metropolitan tahun depan kita akan selesaikan untuk Banjarmasin. Terkait metropolitan ini juga kita akan mendetilkkan lagi program pengembangan kota tua Semarang. Kemudian juga kita akan menangani *review masterplan* dan *development plan National Capital Integrated Coastal* atau NCICD, dimana NCICD yang ada di Jakarta ini merupakan program kerja sama dengan Belanda dan Korea.

Untuk kota besar, kita akan melakukan penyusunan *masterplan* dan *development* unuk Sorong dan sekitarnya. Selanjutnya kota dan kabupaten mendukung pariwisata di Danau Toba, kita akan menyusun *masterplan*nya. Ada 7 ibukota kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba. Ketujuh kota tersebut adalah Kabupaten Simalungun dengan IbuKota Kabupaten Pematang Raya, Toba Samosir Ibukotanya Balige, Kabupaten Tapanuli Utara Ibukotanya Tarutung, Kabupaten Humbang Hasundutan ibukotanya Dolok Sanggul, Kabupaten Samosir Ibukotanya Pangururan, Kabupaten Dairi ibukotanya Sidikalang, dan Kabupaten Karo Ibukotanya Kabanjahe.

Jadi ibukota kabupaten ini tidak berada diobyek pariwisatanya. Seperti obyek wisata yang berada di Kecamatan Parapat. Kecamatan tersebut berada di Kabupaten Simalungun. Tapi Parapat bukan ibukota kabupatennya, karena ibukota kabupatennya Pematang Raya. Jadi perencanaan yang kita buat menyentuh Pematang Raya agar dapat mendukung Parapat. Sedangkan Parapatnya sendiri merupakan kawasan wisata yang akan disentuh Pusat Pengembangan Kawasan Strategis atau Pusat 3.

Secara umum bagaimana Bapak melihat ibukota kabupaten tersebut mendukung pariwisata yang ada di daerahnya?

Setiap daerah punya karakternya masing-masing. Misalnya Kabanjahe, bisa jadi kota jasa, karena dekat dengan Kota Medan. Kemudian misalnya Dolok Sanggul, bisa menyumbang holtikultura untuk daerah sekitarnya, karena tanahnya subur. Selain itu kopinya yakni kopi Lintong, kabarnya paling enak di sana, sehingga perlu

dipasarkan. Kalau Kota Pangururan dari Ditjen Bina Marga sudah mendisain pembangunan jembatan di daerah itu, yang disebut kawasan Tanah Ponggol. Jembatan ini akan menjadi *icon* dan jadi obyek wisata di daerah tersebut.

Untuk mengetahui lebih detail karakter unggulan masing-masing kota untuk mendukung kawasan pariwisata Danau Toba, maka akan diadakan *study* lebih lanjut, sehingga karakter unggulan masing-masing kota tersebut bisa saling mendukung satu sama lain.

Seperti apa harapan Bapak terkait peran Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dalam mendukung program nasional kedepan?

Saya akan mencoba membuat *masterplan* itu lebih tajam sehingga betul-betul menjadi *master* yang harus diikuti. Kedepannya, peran tenaga ahli saya akan tingkatkan. Selama ini kita lebih banyak pada perencanaan secara umum, nanti saya akan lebih detil, dengan melibatkan tenaga ahli seperti tenaga ahli bidang jalan, air, perumahan, dan masalah perbaikan permukiman.

Para tenaga ahli tersebut saya ajak untuk berkontribusi didalam *masterplan* dan juga *development plan*, sehingga lebih membumi dan bisa dilaksanakan. Itu yang ingin saya capai tahun depan, supaya *masterplan* lebih detil dengan bantuan tenaga ahli. Paling tidak yang kami buat menjadi *masterplan* dan juga *development plan* menjadi panduan bagi unit organisasi sektor PUPR.

Kami juga berusaha memberi masukan ke pemda supaya mereka benar-benar memperhatikan dan merencanakan pengembangan kotanya. Jangan dibiarkan berkembang berdasarkan kepentingan masyarakat saja. Jadi ada suatu perencanaan yang bisa mengarahkan masyarakat ketika akan membangun.

Sebenarnya hal ini juga sudah dicoba pusat perkotaan dengan menterjemahkan buku dari UN-Habitat, yang diberi judul "Penataan Kota Bagi Pemimpin Daerah". Hal ini untuk menggugah pemda agar memperhatikan pembangunan kotanya. Dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi bersama-sama dalam menata kawasan perkotaan. **Hendra Djamal/Indira**



Tahun 2017, kita melanjutkan program-program perkotaan yang menjadi target RPJMN. Jadi metropolitan tahun depan kita akan selesaikan untuk Banjarmasin. Terkait metropolitan ini juga kita akan mendetilkkan lagi program pengembangan kota tua Semarang. Kemudian juga kita akan menangani *review masterplan* dan *development plan National Capital Integrated Coastal* atau NCICD

Kementerian PUPR Dukung Peningkatan Infrastruktur dan Kesiapan SDM di Kawasan Timur Indonesia

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Hal ini diungkapkan Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat memaparkan mengenai "Dukungan Pembangunan Infrastruktur PUPR di Kawasan Timur Indonesia pada acara Seminar SDM Indonesia Timur: *Leadership For Millenial Generation to Accelerate Organization Readiness* di Makassar, Kamis (8/12).

"Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah adanya disparitas antara Kawasan Barat Indonesia atau KBI dan KTI, hal ini terlihat dari perbedaan share antara kedua kawasan tersebut terhadap PDRB Indonesia dimana sekitar 80% berasal dari KBI dan hanya 20% dari KTI," ungkap Rido.

Untuk itu, Kementerian PUPR melakukan integrasi pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan prioritas nasional. "Terdapat Kawasan Industri (KI) prioritas yang didukung seperti Bitung, Palu, Morowali dan Konawe. Ada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang juga didukung seperti Mandalika, Wakatobi dan Labuan Bajo. Beberapa dukungan untuk Kawasan Perdesaan Prioritas berdasarkan RPJMN, provinsi lumbung pangan nasional dan kawasan metropolitan seperti Mamminasata," jelas Rido.

Dalam mengupayakan hal tersebut, lanjutnya, Kementerian PUPR mengembangkan pendekatan yang dinamakan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Dari 35 WPS yang ada di Indonesia, 19 WPS diantaranya berada di KTI yang telah dilengkapi dengan masterplan dan development plan," ucapnya.

Di sisi lain, Rido mengungkapkan investasi Kementerian PUPR di wilayah KTI mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp 35,8 T dan tahun 2016 sebesar Rp 42,3 T. Pada tahun 2017, terjadi penurunan dimana investasinya mencapai Rp 36,5 T. "Untuk itu, diperlukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU untuk dapat mengatasi gap pendanaan dalam penyediaan infrastruktur PUPR di KTI," tutur Rido.

Terkait penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Rido mengungkapkan dari 1,2 juta tenaga kerja konstruksi di KTI, maka dari 15,31% jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia, hanya 5% tenaga kerja yang bersertifikat ahli dan terampil. "Tantangan kita adalah bagaimana caranya menciptakan atau mempersiapkan tenaga yang terampil agar dapat membangun infrastruktur PUPR yang merata di KTI," tegas Rido.



Sumber: Dok BPIW

Acara tersebut menghadirkan beberapa pembicara seperti, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmanzah, Chief Human Capital Bank BNI 46, Alex Deni, dan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Dr. Anton Charliyan, MPKN. Pembicara lainnya adalah Direktur Utama Kalla Group, Fattimah Kalla, CEO Trakindo Utama, Maria T. Kurniawati, Presiden Direktur Bluebird Group Holding, Noni Purnomo, dan Direktur Human Resource Aqua Danone, Pambudi S.

Pada kesempatan itu Alex Deni dari Bank BNI 46 menyatakan, hingga saat ini terdapat fenomena lintas generasi yang terjadi di dunia kerja antara generasi baby boomers (tahun 1946-1964), generasi X (tahun 1965-1980) dan generasi Y atau generasi millennial (tahun 1981-1994). Dalam mengatasi gap generation

tersebut dibutuhkan kemampuan dalam hal creativity, learning ability dan adaptability untuk menerima seluruh perubahan dan perbedaan.

Rido mengungkapkan investasi Kementerian PUPR di wilayah KTI mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp 35,8 T dan tahun 2016 sebesar Rp 42,3 T. Pada tahun 2017, terjadi penurunan dimana investasinya mencapai Rp 36,5 T

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmanzah dalam paparannya mengungkapkan bahwa saat ini juga telah terjadi ketidakpastian global, karena pengaruh ekonomi dan politik dunia. Pertumbuhan ekonomi sebesar

5,02% (2016) yang terjadi di Indonesia, berbeda dengan negara-negara lain di Asia. Hal ini dikarenakan, Indonesia tidak terdampak secara langsung dengan adanya global uncertainty. "Mayoritas pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh konsumsi domestik, sehingga kinerja positif ekonomi masih dapat terjaga," ungkapnya. Turut hadir dalam acara seminar tersebut Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal dan Laksamana Pertama TNI, Yusuf, dan Marsekal Madya TNI (Purn), Dede Rusamsi. (lisarosa/infoBPIW)

Awal Tahun 2017, Pemerintah Siap Lakukan Studi Kelayakan Kawasan untuk Penyusunan *Integrated Master Plan* KSPN Prioritas



Wrap Up Meeting Pre-Appraisal Mission dalam rangka Indonesia Tourism Development Program di Jakarta.

Sumber: Dok BPIW

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan studi kelayakan Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, Danau Toba, Borobudur dan Lombok pada awal tahun 2017. Studi kelayakan kawasan dilakukan untuk penyusunan *Integrated Master Plan* pengembangan tiga KSPN prioritas tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam rapat "Wrap Up Meeting Pre-Appraisal Mission dalam Rangka Indonesia Tourism Development Program," di Jakarta, Kamis (22/12).

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Badan Otorita Danau Toba serta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang terkait dengan tiga destinasi wisata tersebut.

Rido mengatakan, pelaksanaan studi kelayakan kawasan diperkirakan berlangsung hingga Mei 2017. "Seperti diketahui KSPN Danau Toba, Borobudur

dan Lombok saat ini sudah memiliki daya tarik terhadap wisatawan asing maupun wisatawan domestik, namun untuk dapat mengembangkan jumlah kunjungan wisatawan perlu dilakukan berbagai penambahan fasilitas-fasilitas di berbagai lini," papar Rido.

Pengembangan berbagai fasilitas, lanjut Rido, dalam rangka mencapai target

studi kelayakan kawasan tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat hingga daerah terkait pengembangan KSPN Danau Toba, Borobudur dan Lombok.

Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, hasil penilaian Bank Dunia terkait permintaan pasar yang perlu dikembangkan di 3 KSPN tersebut meliputi, pengembangan transportasi multidestinas di lokasi destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan jaringan transportasi wilayah perkotaan sekitar.

Bertine melanjutkan, perlu juga ada pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan kearifan lokal dan meminimalisir dampak lingkungan, seperti pengembangan kapasitas komunitas dan budaya lokal di destinasi wisata.

Ia mengatakan, dana pinjaman dari Bank Dunia untuk pengembangan tiga kawasan wisata jumlahnya terbatas, sehingga para pemangku kepentingan perlu melakukan berbagai inovasi skema pendanaan infrastruktur dengan investor lain. "Agar terjadi percepatan dalam pengembangan ketiga kawasan tersebut. Terlebih, kebutuhan infrastruktur akan selalu mengalami pengembangan," terangnya. **(ris/infoBPIW)**

Dengan pengembangan yang didukung Bank Dunia, pada 2019 Danau Toba ditarget mendapat kunjungan 1 juta turis mancanegara serta Borobudur dan Lombok masing-masing ditarget kunjungan 2 juta turis mancanegara.

pemerintah di sektor pariwisata berupa kunjungan wisatawan mancanegara 20 juta pada 2019. Dengan pengembangan yang didukung Bank Dunia, pada 2019 Danau Toba ditarget mendapat kunjungan 1 juta turis mancanegara serta Borobudur dan Lombok masing-masing ditarget kunjungan 2 juta turis mancanegara.

Lebih lanjut dikatakannya, studi kelayakan kawasan untuk 3 KSPN tersebut akan menggunakan biaya pinjaman dari Bank Dunia sebesar 6 juta \$ US. Menurutnya,

Rencana Tata Ruang Harus Jadi Acuan Seluruh Pelaksana Pembangunan



Sumber: Dok BPIW

Keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan bentuk komitmen yang kuat dari negara untuk memposisikan rencana tata ruang (RTR) sebagai landasan bagi seluruh pelaksanaan pembangunan.

"Rencana tata ruang memiliki implikasi pada berbagai dimensi ruang, baik ruang darat, laut, maupun udara, termasuk di dalam bumi," ungkap Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Rukmana saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, pekan lalu.

Dadang mengatakan, dalam UU Nomor

26 Tahun 2007 pengaturannya belum mencakup laut, namun tidak boleh diartikan UU tersebut tidak mencakup wilayah laut. Pasalnya, dalam Pasal 6 ayat 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa

Dadang mengatakan, dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 pengaturannya belum mencakup laut, namun tidak boleh diartikan UU tersebut tidak mencakup wilayah laut.

pengelolaan ruang udara dan ruang laut diatur oleh UU tersendiri.

"Undang-undang ini memberikan delivery untuk mengatur pengelolaan lebih lanjut. Dalam undang-undang tersebut direncanakan adalah Tata Ruang itu adalah wilayah. Adapun wilayah Indonesia adalah darat dan laut," papar Dadang.

Kendati begitu, lanjutnya, pengaturan tata ruang tak boleh ada yang overlapping. Sebab, dalam implikasinya akan mempersulit pelaksanaan rencana tata ruang secara ideal. Untuk itu, lanjut Dadang, kalau ada

rencana tata ruang yang overlapping harus dikembalikan pada sistem dasarnya. "Ikutilah yang membuat sistem bisa establish serta proses harmonisasi harus lebih kuat di antara lembaga negara yang ada," tegasnya.

Dadang berharap, koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait dapat dilaksanakan dengan intens agar sinkronisasi mengenai rencana tata ruang semakin kuat. Kegiatan ini diikuti beberapa instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. **(Rovina/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Siapkan Dukungan Infrastruktur Kawasan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar

Untuk merespon penguatan konektivitas dan sektor maritim di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siapkan dukungan infrastruktur PUPR tahun 2015-2019 di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), sehingga diharapkan mampu merespon tantangan-tantangan pembangunan nasional baik secara global maupun regional.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mewakili Menteri

PUPR, Basuki Hadimuljono pada Seminar Maritim yang mengangkat tema "Negara Membangun Konektivitas Logistik Nasional Menuju Terbentuknya Komitmen Strategis Kedaulatan Maritim Nasional" yang digelar Universitas Hasanuddin di Makassar, Senin (19/12).

Rido juga menjelaskan, dalam pembangunan di Mamminasata serta

mendukung rencana pembangunan Makassar New Port, pada tahun ini dilakukan pembangunan jembatan dan jalan bypass Mamminasata.

"Pada tahun 2017 akan dibangun bypass Simpang Mandai dan pada tahun 2018 akan dimulai pembangunan Jalan Tol Reformasi penghubung Jalan Andi Pangerang Pettarani dengan Pell. Soekarno Hatta," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Rido juga mengakan, pendekatan pengembangan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang diusung Kementerian PUPR, diharapkan dapat memperkuat keterpaduan

dan konektivitas antar kawasan-kawasan strategis nasional, seperti kawasan industri, kawasan startegis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan perbatasan dan lainnya.

Dikatakannya ada empat dari sembilan Nawacita yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastuktur PUPR. "Pertama, membangun Indonesia dari pinggiran

Pada tahun ini dilakukan pembangunan jembatan dan jalan bypass Mamminasata.



Kepala BPIW, Rido Matari saat berkunjung ke Makassar

Sumber: Dok. BPIW

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," paparnya.

Kedua, lanjut Rido, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut Rido mengatakan, pada Nawacita pertama berupa membangun Indonesia dari pinggiran termasuk mengurangi disparitas. "Untuk amanah tersebut Kementerian PUPR membangun infrastruktur di beberapa kawasan perbatasan dan membangun permukiman di daerah tertinggal," terangnya.

Dalam mendukung Nawacita meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, ungkap Rido, Kementerian PUPR membangun jalan raya dan jalan tol untuk meningkatkan aksesibilitas sistem logistik nasional.

"Ketiga, dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik, Kementerian PUPR mendukung secara langsung pengembangan pertanian lahan basah atau pangan dengan menyediakan bendungan, jalur irigasi dan pengendalian

Pada tahun 2017 akan dibangun bypass Simpang Mandai dan pada tahun 2018 akan dimulai pembangunan Jalan Tol Reformasi penghubung Jalan Andi Pangerang Pettarani dengan Pell. Soekarno Hatta

banjir," paparnya.

Terkait Nawacita meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Ia mengatakan, Kementerian PUPR terus mengupayakan meningkatkan kualitas permukiman mulai dari sektor sanitasi, higienitas dan memfasilitasi perumahan swadaya.

Di sisi lain, Rido menyatakan, masalah

utama arus logistik di Indonesia adalah waktu tempuh yang terlalu rendah dikarenakan beban jalan yang terlalu tinggi akibat dominasi pengguna jalan. "Menurut survey Indonesia Infrastructure Initiative, saat ini infrastruktur jalan yang tersedia mencapai 84% sedangkan beban jalan yang harus ditampung adalah sekitar 90%," terangnya.

Dengan demikian, lanjutnya, kemacetan di pusat pertumbuhan dan perkotaan sulit dihindari. "Kemacetan juga turut disebabkan oleh kurangnya pengendalian lalu lintas," terang Rido.

Hadir dalam acara tersebut, Asdep Kemenko Maritim, Rusli Rahim mewakili Menteri Kemenko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Ketua Balitbang Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Firda yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo serta pemangku kepentingan lainnya di kawasan Mamminasata. **(INI/InfoBPIW)**

BPIW Kembangkan Skema Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur PUPR dihadapkan pada tantangan terbatasnya kapasitas fiskal negara sehingga tidak semua pembangunan infrastruktur dapat dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN. Untuk itu perlu dikembangkan kerja sama sebagai salah satu alternatif solusi menyikapi gap pembiayaan tersebut. Keterbatasan kemampuan fiskal negara bukanlah berarti pembangunan infrastruktur menjadi mandeg. Para stakeholders perlu duduk bersama agar dapat memikirkan langkah-langkah terobosan yang dapat meminimalkan gap pembiayaan infrastruktur dan mensinergikan program-program pembangunan di kawasan-kawasan prioritas.

"Pertemuan yang kita lakukan di Medan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi skema-skema kerja sama yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang coba kita inisiasi di berbagai tempat. Pertemuan ini bukanlah yang pertama, kita telah mengadakan

pertemuan dalam rangka menggali potensi CSR, KPBU, maupun skema kerja sama lainnya," ujar Dadang saat membuka Focus Group Discussion Pengembangan Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Terpadu di Kawasan Strategis dan Perkotaan, di Medan, Selasa (6/12).

Dadang menyampaikan bahwa BPIW ingin terus menggali gagasan terkait bentuk kerja sama seperti apa yang akan dikembangkan

Lebih lanjut Dadang menyampaikan bahwa BPIW ingin terus menggali gagasan terkait bentuk kerja sama seperti apa yang akan dikembangkan. "Kita angkat model baru dari skema pendanaan. Model baru ini bisa dijadikan kebijakan nasional dan dapat diterapkan di banyak tempat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur

yang berkualitas dengan skema pendanaan yang inovatif. Kita melakukan ini agar pembangunan infrastruktur dapat lebih fokus dan terarah," ungkap Dadang.

Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR telah menetapkan koridor pertumbuhan baru, dimana investasi di kawasan tersebut dilakukan bersama-sama atau dengan kata lain dilakukan secara terpadu antar sektor dan antar tingkat pemerintahan. Keterpaduan itu dirancang melalui masterplan wilayah pertumbuhan di 35 Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. "Masterplan merupakan visi pembangunan infrastruktur, tapi itu tidak cukup, karenanya kita juga menyiapkan development plan dalam kerangka rencana tiga tahunan dan tahunan, dimana sudah ada anggarannya di APBN. Development ini orientasinya mengarah ke manfaat dan dampak, bukan sekedar output saja," tegasnya.

Forum Diskusi yang digagas BPIW



ini merupakan salah satu cara untuk mempertemukan stakeholders dari berbagai sektor untuk bersinergi menemukan model kerja sama yang tepat dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Pada forum diskusi yang dilaksanakan dalam dua sesi ini menghadirkan narasumber antara lain Dodi S. Riyadi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Win Elas Yekti dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Gunsairi dari Kementerian PPN/Bappenas, Brawijaya dari Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan M. Rudi Siahaan dari Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. Hadir sebagai moderator diskusi yaitu Hadian A. Wardhana dari Dewan Ketahanan Nasional dan Ernady Syaodih dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung.

Materi yang menarik untuk dibahas diantaranya mengenai kesiapan regulasi kerja sama dan mekanisme pelibatan para pengusaha dalam skema KPBU yang dikembangkan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Sub Direktorat

Kelembagaan, Informasi dan Regulasi, Bappenas Gunsairi menyampaikan bahwa regulasi tentang KPBU sudah lengkap dan siap untuk dijadikan payung hukum dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah juga giat melakukan studi kelayakan

“Kita angkat model baru dari skema pendanaan. Model baru ini bisa dijadikan kebijakan nasional dan dapat diterapkan di banyak tempat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas dengan skema pendanaan yang inovatif” ungkap Dadang.

investasi infrastruktur sehingga program-program infrastruktur dapat dijual kepada para investor.

Pada kesempatan ini juga dibahas program-program infrastruktur prioritas di kawasan-kawasan strategis yang menarik untuk dikerjasamakan dengan berbagai sektor terkait. Program tersebut termasuk diantaranya program yang termuat dalam

Proyek Strategis Nasional maupun program dalam rangka mendukung terwujudnya nawa cita. Selanjutnya diharapkan agar Pemerintah, pemda, pengembang, asosiasi profesi, akademisi, dan organisasi masyarakat dapat bersinergi membangun infrastruktur yang handal sehingga terwujud kawasan-kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan yang berdaya saing.

Kegiatan ini dihadiri para peserta dari berbagai instansi seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Karo, Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Bappenas, PTPN III (Persero), Apindo Wilayah Sumatera Utara, Akademisi ITM dan USU, IAP Sumatera Utara, Walhi, dan para pejabat serta staf dari unit-unit organisasi di Kementerian PUPR. **Hen/infoBPIW**



Terapkan SMM, BPIW Tingkatkan Kinerja Pelayanan

Sejumlah Unit Kerja Raih Sertifikasi ISO 9001: 2008 dan ISO 9001: 2015

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi yang mengedepankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan langkah perubahan mendasar yang selaras dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No.4/PRT/M/2009 tentang Manajemen Mutu Kementerian PU. Permen PU tersebut dijalankan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan agar para pegawai lebih produktif dan meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas di lingkungan BPIW.

Berkat kinerja dan komitmen yang dilakukan BPIW Kementerian PUPR selama tahun 2016, sejumlah unit kerja di lingkungan BPIW telah mendapat sertifikasi berstandar internasional (ISO) 9001: 2008 dan ISO 9001: 2015 dari lembaga sertifikasi.

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana menjelaskan, penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001: 2015 diharapkan dapat semakin memacu para pegawai di lingkungan BPIW agar bekerja menjadi lebih bersih, profesional, dinamis, produktif serta akuntabel. Hal tersebut dilakukan BPIW karena sebagai lembaga publik seluruh anggaran yang digunakan BPIW berasal dari rakyat, sehingga setiap rupiah yang digunakan perlu pertanggungjawaban *output* atau *outcome*-nya.

“Terlepas dari sulit atau tidaknya pelaksanaan ISO 9001, kita senantiasa tetap berupaya menjalankan dengan optimal, yang tujuan mewujudkan kepuasan pelanggan serta seluruh pemangku kepentingan yang dilayani BPIW,” papar Dadang.

Sejak tahun 2015 BPIW telah merintis penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) melalui Sekretariat BPIW dengan ISO 9001:2008. Seiring perkembangannya yang mengalami penyesuaian dengan perubahan standar dari ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. Oleh karena itu, BPIW turut mengembangkan standar SMM sesuai ISO 2008:2015. Perubahan tersebut beriringan dengan proses revisi Permen PU No.04/PRT/M/2008 tentang SMM. Pada tahun 2016, BPIW Kementerian PUPR juga menambah ruang lingkup sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008.

“Hal itu dilakukan untuk membangun kepercayaan lebih luas serta memelihara konsistensi di lingkungan BPIW,” ungkap Dadang.

Salah satu upaya untuk menjamin kinerja BPIW sesuai dengan target yang direncanakan, baik waktu maupun kualitas dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi. Tujuannya untuk memastikan konsistensi penerapan SMM yang diterapkan BPIW. “Secara bertahap kami juga berupaya untuk memperbaiki sistem kerja. Selain konsisten menerapkan serta mengembangkan SMM di lingkungan BPIW,

sehingga pengelolaan mutu akan menjadi budaya dalam kehidupan organisasi di BPIW,” harap Dadang.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, BPIW Kementerian PUPR, Hasna Widiastuti mengungkapkan Sekretariat BPIW memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terhadap internal organisasi BPIW, termasuk turut menunjang fungsi lain di BPIW dalam menghasilkan produk-produk BPIW yang optimal.

Oleh karena itu, lanjutnya, senantiasa konsisten menerapkan dan mengembangkan SMM di lingkungan Sekretariat maupun lingkungan BPIW. SMM BPIW dalam pelaksanaannya mengaktualisasikan 8 (delapan) prinsip manajemen mutu dalam setiap proses kegiatan, yakni .

- 1) Fokus pelanggan
- 2) Kepemimpinan
- 3) Keterlibatan personil
- 4) Pendekatan proses

Tahun 2016 sejumlah unit kerja di lingkungan BPIW telah mendapat sertifikasi berstandar internasional (ISO) 9001: 2008 dan ISO 9001: 2015 dari lembaga sertifikasi



Sekretaris BPIW, Kementerian PUPR Dadang Rukmana saat membuka acara

Sumber: Dok BPIW

- 5) Pendekatan sistem terhadap manajemen
 - 6) Perbaikan berkesinambungan
 - 7) Pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan
 - 8) Hubungan pemasok yang saling menguntungkan
- Menurutnya, SMM secara sederhana dapat dipahami sebagai sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan dalam hal pencapaian mutu. SMM memiliki peranan dalam reformasi birokrasi. Sebab, penerapan SMM ini dapat menjadi kendaraan menuju pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, dalam SMM juga disyaratkan adanya *Standard*

Salah satu upaya untuk menjamin kinerja BPIW sesuai dengan target yang direncanakan, baik waktu maupun kualitas dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi

Operation Procedures (SOP) untuk setiap pekerjaan. Oleh karena itu, pelaksanaan SMM di lingkungan BPIW dilakukan untuk mengakomodasi semua sistem yang terkait dengan penjaminan mutu seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan.

Tahapan sertifikasi ISO 9001: 2008 dan ISO 9001: 2015, lanjutnya, dilakukan mulai dari persiapan, yang terdiri dari melakukan inventarisasi dokumen sistem mutu sesuai kondisi eksisting di lingkungan BPIW serta melakukan review dokumen sistem mutu.

Kemudian, melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) perancangan dan pengembangan dokumentasi SMM. Ada juga konsinyasi dalam rangka persiapan Survailen, pelaksanaan Survailen yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 pada tahun 2015. Tahap berikutnya melakukan sosialisasi dokumen sistem mutu yang telah disusun dan didistribusikan pada tahun 2016.

Selain itu, ada workshop penerapan dokumen rencana mutu yang terdiri atas dokumen rencana mutu pelaksanaan dan dokumen rencana mutu kontrak serta workshop pematapan auditor internal (lanjutan). Ada juga audit Internal serta rapat tinjauan sistem manajemen mutu serta pelaksanaan sertifikasi sampai unit kerja eselon 3.

Untuk tahapan pelaksanaan, antara lain pelaksanaan rapat persiapan yang di hadiri oleh Tim Supervisi dari Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, BPIW dan tim konsultan yang dihadiri perwakilan unit kerja eselon 3 BPIW.

Setelah itu dilakukan pembahasan laporan pendahuluan yang dihadiri perwakilan unit kerja eselon 3 BPIW. Kemudian dilakukan FGD dalam rangka perancangan dan pengembangan dokumentasi SMM yang dilaksanakan yang dihadiri perwakilan unit kerja eselon 3 BPIW.

Untuk menentukan kelayakan Sekretariat BPIW mempertahankan sertifikat SMM ISO 9001: 2008, maka diperlukan suatu audit survailen oleh lembaga sertifikasi. Untuk mempersiapkan materi audit sertifikasi dilaksanakan konsinyasi persiapan audit survailen yang dihadiri tim supervisi, konsultan dan Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana. Dilaksanakan juga konsinyasi audit survailen yang dihadiri oleh Tim Supervisi dari Bagian Kepegawaian dan Ortala, tim konsultan.

Untuk pelaksanaan audit survailen dilakukan oleh Badan sertifikasi. Kemudian tahap berikutnya dilakukan pelaksanaan pembahasan hasil



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada saat BPIW Expo 2016 menyerahkan Sertifikat ISO 9001:2008 dan ISO 9001: 2015



Workshop peningkatan kapasitas Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Bandung

Sumber: Dok BPIW

audit survailen yang dihadiri perwakilan unit kerja eselon 3 BPIW. Tahapan selanjutnya, ada sosialisasi SMM dilaksanakan di Bandung selama dua hari dengan perwakilan unit kerja eselon 3 BPIW. Tahapan berikutnya dilaksanakan workshop SMM yang dilaksanakan di Bandung sebanyak 2 kali masing-masing selama 2 hari dengan peserta dari lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebanyak 30 orang.

Rapat tinjauan manajemen merupakan salah satu prosedur wajib yang harus dilaksanakan oleh pengelola SMM. Hal itu telah dipatuhi dengan terselenggaranya rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh unit eselon III Sekretaris BPIW. Termasuk, mengundang perwakilan dari unit eselon II di lingkungan BPIW. Hal itu sebagai upaya monitoring dan evaluasi Sekretariat BPIW atas progress pelaksanaan SMM pada unit II di lingkungan BPIW.

Setelah itu dilakukan audit eksternal tahun 2016 untuk sertifikasi ISO 9001:2008 pada unit kerja eselon III BPIW yang dilakukan oleh Badan sertifikasi serta dilaksanakan audit eksternal untuk meeting-meeting unit kerja eselon 2.

Sekretariat Badan memiliki fungsi dukungan manajemen, sehingga berperan mendorong dan memastikan seluruh unit kerja eselon II di

lingkungan BPIW menerapkan SMM.

Saat ini sertifikasi ISO 9001: 2008 telah diraih Sekretariat BPIW lingkup Layanan Kesekretariatan Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan Program dan Evaluasi BPIW.

Sertifikasi ISO 9001: 2008 telah diraih Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW lingkup layanan Penyediaan Kebijakan Teknis untuk Perencanaan Strategis dan Analisis Manfaat, Perencanaan Infrastruktur, Penganggaran dan Umum.

Sertifikasi ISO 9001: 2008 diraih juga Pusat Pengembangan Kawasan Strategis lingkup layanan Penyediaan Kebijakan Teknis Area Inkubasi dan Fasilitas Pengadaan Tanah.

Selain itu, Sertifikasi ISO 9001: 2015 diraih Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW lingkup layanan Penyusunan program pada Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Kemudian, sertifikasi ISO 9001: 2015 diraih juga Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan lingkup layanan Penyediaan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan, Kota Besar, Kota Baru serta Keterkaitan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. **(Tim Redaksi/Setyo)**

Sekretariat Badan memiliki fungsi dukungan manajemen, sehingga berperan mendorong dan memastikan seluruh unit kerja eselon II di lingkungan BPIW menerapkan SMM.

Rangkaian Peringatan Ha

Kementerian PUPR menggelar peringatan Hari Bakti PUPR ke-71. Berbagai kegiatan digelar seperti pertandingan *gateball*,



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono foto bersama dengan jajaran Eselon I di Kementerian PUPR



Talkshow bersama Andi F. Noya pada Malam Kilas Balik Kementerian PUPR



Upacara Hari Bakti PUPR 2016



Tabur Bunga di Makam Pahlawan

ri Bakti PUPR yang Ke-71

upacara bendera, olahraga sepeda, dan lomba senam poco-poco. Berikut dokumentasi rangkaian kegiatan tersebut.



Perwakilan Gateball dari Dharma Wanita Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan foto bersama dengan para peserta olahraga sepeda



Foto bersama seusul lomba senam poco-poco



Menanam pohon di Bendungan Tritip, Balikpapan

Pameran di Pulau Lembata

BPI W Kementerian PUPR berpartisipasi dalam Pameran Hari Nusantara Expo yang diadakan Kementerian Dalam Negeri di Pantai Lewoleba yang berada di Kabupaten Lembata, NTT, yang dimulai 9 hingga 13 Desember 2016. Berikut potret kegiatan tersebut



Wakil Gubernur NTT membuka Pameran Nusantara Expo 2016 di Lewoleba



Pengunjung yang datang ke booth BPIW di Hari Nusantara EXPO 2016



Pengunjung yang datang ke booth BPIW di Nusantara EXPO 2016



Bupati Lembata saat berkunjung ke Booth BPIW di Nusantara Expo

BPIW EXPO 2016

Guna menampilkan produk-produk yang telah dibuat, BPIW Kementerian PUPR mengadakan BPIW Expo, 15-16 Desember 2016. Berikut beberapa dokumentasi dari serangkaian acara tersebut:



Penyerahan ISO 9001 : 2008 dan ISO 9001 : 2015 kepada unit kerja di lingkungan BPIW



Kepala BPIW menjelaskan konsep WPS kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono



Foto bersama dengan Butet Kartaradjana



Talkshow tentang KSPN di BPIW EXPO 2016



KUNJUNGI INFO BPIW DI WEBSITE & AKUN KAMI:

www.bpiw.pu.go.id

 @informasiBPIW

 Layanan Informasi BPIW



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**